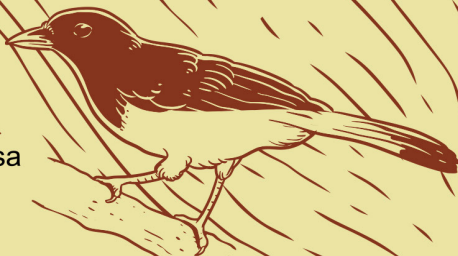


ARAH TATANAN BARU

Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



ARAH TATANAN BARU

Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya

Webinar Seri 1
Kongres Kebudayaan Desa 2020
1-10 Juli 2020



ARAH TATANAN BARU

Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya

©Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,

Panggungharjo, Yogyakarta

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Dadang Ari Murtono
Penyelia aksara	: Chusna Rizqati
Desain & ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, dan Agus Teriyana
Tata letak isi	: Prima Hidayah

Cetakan pertama, Agustus 2020

Ukuran Buku:

13 x 19 cm, xxxviii + 122 hlm.

ISBN:

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Dadang Ari Murtono

Pada pembukaan Kongres Kebudayaan Desa, 1 Juli 2020, Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Panggunharjo, mengatakan bahwa desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi. Pernyataan puitis yang terkesan meromantisir desa tersebut, diakui atau tidak, menemukan pengejawantahannya hari ini. Sebelum akhir tahun 2019 (atau awal 2020), barangkali tak banyak di antara kita yang menduga bahwa akan tiba suatu hari di mana bencana besar bakal menjelma dalam wujud sesuatu yang

tak kasat mata. Kita menyebutnya virus Corona dan menamakan penyakit yang diakibatkannya sebagai Covid-19. Beberapa bulan setelah kasus pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok WHO menabalkan status pandemi terhadap wabah ini. Lantas, semua berubah. Pandemi ini menyadarkan orang bahwa industri kesehatan gagal melindungi masyarakat. Dengan mempertimbangkan bagaimana cara penularannya, wabah ini selanjutnya juga memaksa kita mengubah relasi yang selama ini dianggap normal. Manusia kemudian membatasi sentuhan fisik yang biasa dilakukan, seperti jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Di balik ancaman yang muncul, Covid-19 membuat kita mempertanyakan tatanan dan kebiasaan yang selama ini terjadi. Termasuk kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah, tetapi justru diatur oleh swasta dan kekuatan modal.

Covid-19 mengubah semua tatanan tersebut tanpa teriakan revolusi. Kota-kota lumpuh. Jalanan yang biasa ramai dan macet tiba-tiba berubah lengang. Udara memang menjadi lebih segar karena polusi yang berkurang, tetapi itu diiringi kecemasan yang menyesak. Perekonomian ambruk. Lantas, kita mendengar berita tentang perusahaan-perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya. Lantas, para manusia urban itu, yang bertahun-tahun sebelumnya meninggalkan desa dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota, menyadari bahwa kota tak lagi seperti yang mereka angankan. Seperti seorang tualang yang lelah mereka mulai teringat kepada desa, kepada ibu bumi mereka.



Mengikuti jejak burung-burung yang kembali ke sarang menjelang petang, mereka pun pada akhirnya berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Bukan semata kenangan masa kecil yang menyebabkan mereka pulang, melainkan lebih karena desa, seperti yang disebutkan oleh Wahyudi Anggoro Hadi, adalah tempat berbagi, sesuatu yang barangkali merupakan barang langka di kota yang individualistis. Semangat gotong royong adalah sesuatu yang lekat dengan desa. Dan seperti yang kita ketahui, semenjak pandemi menerjang negeri kita dan pemerintah kalang kabut menjamin kehidupan warganya, gotong royong antarwarga itulah yang menopang agar kehidupan terus berjalan. Berbagai gerakan warga membantu warga lainnya muncul di negara ini, mulai dari pembagian sembako, penggalangan dana untuk warga terdampak, pembagian masker, pengadaan APD oleh masyarakat untuk tenaga kesehatan, dan lain-lain adalah wujud dari gotong royong tersebut.

Gotong royong sesungguhnya memang bukan hanya monopoli desa. Namun, desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di republik ini memiliki berbagai kelebihan yang memungkinkan gotong royong tersebut lebih optimal justru karena lingkungannya yang relatif tidak terlalu besar dan watak warganya yang tidak individualistis.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut rasanya tidak berlebihan bila tatanan baru setelah pandemi Covid-19 ini bakal berpusat di desa. Webinar pertama yang mengawali seri webinar dalam Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020 kemudian mencoba mereka-reka arah tatanan baru Indonesia, apa dan bagaimana hidup di era pandemi



dan sesudahnya. Tema itulah yang menjadi pokok bahasan webinar seri pertama yang digelar tanggal 1 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom dengan *total users* mencapai 3.231 dan disiarkan secara langsung melalui Youtube. Di Youtube sendiri sampai ketika tulisan ini dibuat tanggal 24 Juli 2020 tayangan ini sudah ditonton sebanyak 3.714 kali. Webinar ini menghadirkan enam narasumber, antara lain Laode M. Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D. (Direktur Eksekutif Kemitraan/ Partnership Governance Reform in Indonesia), Budi Arie Setiadi (Wakil Menteri Desa PDTT), Prof. Dr. Melani Budianta, M.A., Ph.D. (Guru Besar FIB UI), Garin Nugroho (Budayawan), Dr. Muhammad Faisal (Founder Youth Laboratory Indonesia), dan Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt. (Lurah Desa Panggungharjo), serta dimoderatori oleh FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019).

Melani Budianta dalam webinar seri 1 Kongres Kebudayaan Desa ini menyimpulkan bahwa kita memerlukan peradaban baru akibat pandemi ini, peradaban yang bukan urban sentris. Beliau juga menyebutkan bahwa peradaban baru ini akan mengarah ke desa, tetapi bukan desa yang dikembangkan dengan perspektif urban atau desa masa silam yang sudah hilang. Peradaban baru tersebut yang disebutnya sebagai Peradaban Desa Masa Depan adalah peradaban yang “berbasis pada tatanan yang ramah pada alam dan lingkungan, berbasis pada komunitas yang mempunyai ketahanan pangan dan ketangguhan budaya”. Peradaban yang “berakar pada kekayaan budaya lokal, yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan, wawasan, dan nilai untuk menjaga keragaman hayati, solidaritas, dan



keguyuban sosial untuk saling menjaga, merawat relasi antarmanusia dan memmanusiakan manusia melalui seni dan budayanya”.

Pandemi Covid-19 akan (atau sedang) menciptakan arus balik peradaban. Arus tidak lagi bergerak dari kota ke desa, melainkan sebaliknya. Nilai-nilai desa, seperti gotong royong atau musyawarah akan mewarnai kehidupan kota. Ketika pandemi menghancurkan perekonomian, mendorong warga perkotaan untuk melakukan *panic buying*, desa hadir dengan lumbung desanya. Ketahanan pangan di desa, sebagai akibatnya, lebih kuat ketimbang di kota. Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebut inilah saat yang tepat bagi desa untuk menyerbu kota. Tentu saja istilah menyerbu yang digunakan kali ini tidak bisa dimaknai dengan perspektif lama yang mengandaikan keberadaan desa sebagai semata penopang kota, desa ada untuk kota, yang menyebabkan arus urbanisasi besar-besaran sehingga desa kehilangan tenaga produktifnya. Dengan optimis, beliau memandang bahwa desa bisa menjadi pelopor dan motor penggerak pemulihan ekonomi bangsa ke depan.

Keoptimisan tersebut seyogianya tidak membuat siapa pun lalai. Garin Nugroho menyampaikan sekaligus mengajak kita untuk merenung kembali tentang paradoks-paradoks yang menyertai peradaban, mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0 yang akhir-akhir ini sering digaungkan. Keoptimisan tersebut bisa saja berubah menjadi petaka bila setiap pemangku kepentingan tidak berhasil memanfaatkan momentum revolusi industri 4.0



sekaligus pandemi Covid-19 yang memaksa kita merumuskan arah peradaban baru ini, sama seperti halnya kita melewatkan momentum di revolusi industri-revolusi industri sebelumnya.

Berbicara tentang revolusi industri 4.0, secara otomatis akan menyeret-nyeret juga narasi-narasi besar lainnya, yaitu milenial dan bonus demografi. Untuk waktu yang lama, triangulasi tiga narasi besar ini dianggap sebagai kesatuan yang kuat yang diyakini sebagai tatanan dunia baru bagi Indonesia di masa depan. Muhammad Faisal membicarakan triangulasi tersebut dan kemudian menyebut bahwa pandemi yang tiba-tiba datang menyebabkan keterpisahan di antara ketiganya. Pandemi sebagai momen pemisah. Beliau menyampaikan bahwa pengaruh Covid-19 lebih kuat ketimbang revolusi industri 4.0 sebab pandemi ini “mengubah cara hubungan sosial (*physical distancing*), pandangan terhadap kesehatan, kematian, pendidikan, ekonomi, kepemimpinan politik, hingga penentuan karier di masa depan. Bahkan sampai tingkat tertentu pandemi ini mendekonstruksi segala imaji tentang revolusi industri 4.0. Sebab masa karantina menjadi proses inkubasi serta retrospeksi sebagian generasi untuk merumuskan ulang pandangan mereka terhadap dunia juga masa depan. Gerakan aksi *Black Lives Matter* yang memuncak pada bulan Juni 2020 di Amerika Serikat serta dunia merupakan salah satu buktinya”.

Seterusnya, Muhammad Faisal juga menyebut bahwa generasi muda hari ini yang mengalami masa-masa mencekam akibat Covid-19 tidak akan lagi “mendengar narasi-narasi hebat tentang



revolusi industri, *singularity*, maupun industri berbasis kreativitas untuk kemakmuran ekonomi. Sebab narasi tersebut menjadi kurang kontekstual di tengah pandemi juga resesi ekonomi yang akan menyertainya”. Sebagai gantinya, narasi-narasi tersebut akan digantikan oleh narasi-narasi yang lebih kontekstual dan heroik seperti gotong royong dan kemanusiaan. Beliau memprediksi akan ada gerakan kembali ke akar setelah ini di mana “gotong royong sebagai inti sari kearifan dan kebudayaan masyarakat desa akan menjadi denyut nadi generasi muda Indonesia di masa depan”.

Lebih jauh, hal ini akan menyebabkan “kebudayaan desa akan kembali relevan di tengah tatanan baru yang akan dibangun oleh generasi muda. Sebab tata kehidupan desa yang *self sustaining* lebih tangguh menghadapi dua terpaan krisis yang akan menyusul setelah Covid-19 berlalu, yaitu resesi ekonomi dan perubahan iklim radikal.”

Desa sepertinya memang memegang peranan penting di masa pandemi Covid-19 ini dan juga masa-masa setelahnya. Namun, itu tidak lantas berarti bahwa segala yang berada di desa baik-baik belaka. Laode M. Syarif mengingatkan kita bahwa desa (atau masyarakat desa) juga menyimpan kebobrokan-kebobrokan yang tidak berbeda jauh dengan kota. Dengan rangkaian data yang disodorkannya, ia menunjukkan bahwa dana desa adalah iming-iming menggiurkan yang mampu membuat orang desa melakukan korupsi.

Peran penting desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini dalam praktik nyatanya ditunjukkan Wahyudi Anggoro Hadi selaku Lurah Desa Panggungharjo. Di Panggungharjo, para pemangku



kepentingan menyadarkan warga akan bahaya Covid-19 dengan melakukan penyemprotan lingkungan secara demonstratif, misalnya, atau memberi apresiasi yang bagus terhadap para penyintas Covid-19. Mencermati apa yang terjadi di Panggungharjo (dan kemungkinan besar juga terjadi di desa-desa lain), kita bisa lebih optimis bahwa kita akan bisa melalui pandemi ini dengan menjadikan desa sebagai benteng pertahanan yang kuat. Di dalam tulisan yang merupakan hasil *call for papers*, Aditya Mahendra Putra dari Sanggar Inovasi Desa menegaskan kembali bagaimana desa bisa menjelma sebagai benteng yang kuat di masa pandemi ini. Ia menulis bahwa budaya gotong royong dan interaksi-interaksi sosial sudah tersemai subur di pedesaan. Hal ini menjadi sebuah keuntungan karena dari interaksi-interaksi yang terjalin dapat membentuk ikatan saling percaya (*trust*) di antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk menguatkan pernyataannya, ia juga menghadirkan contoh kasus yang membentang sejak krisis ekonomi 1998.

Ia menyatakan bahwa desa terbukti mampu menahan guncangan akibat krisis yang terjadi, mulai dari reformasi 1998, resesi ekonomi global 2008, hingga krisis akibat pandemi 2020. Setidaknya hipotesis yang menyatakan bahwa semakin subsisten suatu kelompok masyarakat maka semakin kecil pula dampak yang dirasakan terhadap dinamika global terbukti. Ketika industri dan sistem pasar di kota lesu akibat pandemi, dampak yang dirasakan



desa cenderung tidak signifikan karena mereka punya sistem nilai-nilai yang menjadi benteng pertahanan.

Webinar seri 1 Kongres Kebudayaan Desa 2020 dengan tema “Arah Tataan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya” yang hasilnya dikumpulkan dalam buku ini, bertujuan untuk mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Republik Indonesia perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat. Sekaligus memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintahan serta masyarakat desa. Itu memang bukan kerja mudah, tetapi tidak berarti mustahil dilakukan.[]





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera
bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa

di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkatkan statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefeksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati.



Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres



Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual*



trust untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam.*[]

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Melawan korupsi dari desa.

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat

banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada



prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik



dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak

ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.



Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan



dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian

atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala



pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara



yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang



mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama



besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retorik, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa



dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi



ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan, sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam. []

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Sekapur Sirih	
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	xiv
Hamengku Buwono X	
2. Dirwktur Dikyanmas KPK	xix
Giri Suprpdiono	
3. Menteri Desa, PD TT	xxiv
Abdul Halim Iskandar	

Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud	xxviii
Dr. Hilmar Farid	
Arus Balik: Membangun Peradaban Desa Masa Depan	1
Melani Budianta	
Saatnya Desa Menyerbu Kota	19
Budi Arie Setiadi	
Paradoks Membangun Daya Hidup Desa: Membaca Era Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0	29
Garin Nugroho	
Generasi Kembali ke Akar sebagai Tatanan Dunia Pascapandemi	40
Dr. Muhammad Faisal	
Menakar Integritas Masyarakat Desa di Tengah Pandemi	53
Laode M. Syarif	
Desa Berdikari sebagai Pertahanan Terakhir Menghadapi Krisis	64
Wahyudi Anggoro Hadi	



***Physical Distancing* Bukan Berarti *Social Distancing* 75**

Aditya Mahendra Putra

Epilog 87

Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa

Deklarasi Arah Tatatan Indonesia Baru dari Desa 117

Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 120





Arus Balik: Membangun Peradaban Desa Masa Depan

Melani Budianta

Pendahuluan: Belajar dari Pandemi

Di awal tahun 2020 peradaban dunia mendapat guncangan akibat penyebaran pandemi Covid-19. Arus kapitalisme global yang dibangun atas suplai transnasional secara mendadak melambat karena terhentinya lalu lintas antarnegara. Kemajuan yang semula ditandai oleh percepatan pembangunan berteknologi canggih terhenti oleh hadangan wabah yang menyebar lebih cepat

dari kemampuan kendali manusia melalui sains dan pengobatan modern. Gaya hidup urban yang digadang-gadang akan merata dalam jejaring *smart cities* dunia, ditunjang oleh putaran gasing produksi dan konsumsi tiba-tiba dipertanyakan ketika kota-kota besar menjadi pusat penyebaran pandemi.

Apa yang dihadapi dunia sejak awal 2020 menunjukkan bahwa peradaban supramodern dengan eksploitasi terhadap alam secara masif tidak mungkin berkelanjutan. Peringatan akan hal ini sudah disuarakan oleh intelektual, aktivis lingkungan, dan budayawan berpuluh tahun sebelumnya, melalui wacana pemanasan global serta kerusakan lingkungan (Klein, 2014¹; Kobert, 2014²; Gosh, 2016³). Telah dikeluarkan berbagai pernyataan, konferensi, kesepakatan untuk mengerem dan menghentikan arus peradaban yang mengancam keberlangsungan hidup planet bumi. Selain keserakahan menguras alam untuk konsumsi, peradaban yang tidak sehat itu ditandai oleh kesenjangan tajam antara negara adidaya dan negara miskin, pemilik modal dan pekerja, pusat dan pinggiran, kota dan desa.

Ketika laju peradaban yang tak sehat itu tidak dapat ditahan maka gelombang balik dari alam dan wabah tanpa kompromi menghadang. Manusia terpaksa berkompromi dengan menghentikan

-
1. Klein, Naomi. 2014. *This Changes Everything: Capitalism and Climate Change*. London: Allen Lane.
 2. Kobert, Elizabeth. 2014. *The Sixth Extinction: The Unnatural History*. New York: Henry Holt and Company.
 3. Gosh, Amitav. 2016. *The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable*. Chicago: University of Chicago.



kegiatannya untuk sementara waktu agar penyebaran virus melambat. Harapannya, jika vaksin dapat segera ditemukan dan virus terkontrol, kehidupan kembali ke tataran yang disebut “normal baru”: balik ke perputaran semula, tetapi menyesuaikan dengan “protokol kesehatan”. Padahal, itu berarti kembali lagi pada peradaban yang sudah diketahui tidak sehat, yang menurut para pakar hanya menunda kepunahan bumi.

Dalam masa tunda – ketika peradaban lama tertahan – semestinya kita dapat merenungkan pelajaran apa yang kita peroleh. **Pertama**, kita melihat bahwa kota tidak dapat bertahan tanpa desa sebagai suplai pangan dan suplai tenaga. Namun, ketergantungan itu tidak membuat desa semakin kaya melainkan sebaliknya. Jadi, ada yang salah di situ. **Kedua**, dalam berbagai diskusi kebijakan di era pandemi, aspek ekonomi dan aspek kesehatan merupakan dua hal yang sering dipertentangkan untuk menimbang mana yang lebih penting diprioritaskan (“mati karena wabah atau mati karena kelaparan”). Padahal, yang terjadi banyak orang mati karena kerentanan sosial budaya. Kegagalan komunikasi budaya dengan masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang, aliran, akses pendidikan yang kompleks mengakibatkan pelanggaran rambu-rambu kesehatan. Masyarakat juga mengalami gegar budaya untuk mengubah kebiasaan dan tradisi yang telah mengakar dalam waktu singkat demi istilah asing yang disebut *social distancing*. Individu-individu yang tercerabut dari tanah, kampung halaman, dan ikatan sosial komunitas dan keluarganya tidak memiliki sistem dukung dan



jaring pengaman untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya. Kemampuan literasi kritis yang rendah menyebabkan individu yang mengambang ini mudah digerakkan oleh hoaks dan pengaruh tokoh karismatik untuk mengabaikan berbagai rambu kesehatan. Semua ini menunjukkan bahwa yang tak kalah penting dari aspek kesehatan dan ekonomi adalah ketangguhan budaya dan pentingnya suatu tatanan sosial yang dapat membangun ketangguhan budaya tersebut secara kolektif. **Ketiga**, kita melihat bahwa semakin hijau dan terjaga lingkungan alam serta keragaman hayatinya, semakin besar potensi wilayah itu untuk menghidupi warganya. **Keempat**, komunitas kecil yang mandiri suplai pangan dan mampu membangun sistem untuk menata relasi sosial, merawat warga yang kekurangan, menyediakan sarana kesehatan sederhana dengan berbagai kreativitas dan inovasi lokal untuk menghibur dan berkomunikasi, mempunyai ketangguhan yang lebih besar daripada komunitas yang tergerus oleh gaya hidup individual, transaksional, dan konsumtif.

Pembangunan Desa yang Bermasalah

Kesimpulan dari pelajaran yang kita peroleh dari pandemi di atas adalah urgensi bagi manusia untuk membuat peradaban baru, yang jelas bukan lagi urban sentris dengan pola pembangunanisme. Sudah semakin jelas bahwa arah arus balik ini membawa kita ke desa, tetapi bukan desa masa lalu yang sudah hilang maupun desa yang selama ini dikembangkan dengan perspektif urban.



Salah satu arah pembangunan desa berperspektif urban pada masa kini adalah mendatangkan devisa sebanyak mungkin dari desa. Salah satu penghasil devisa adalah orang desa yang bekerja sebagai buruh atau pekerja di kota atau TKI di mancanegara. Akibatnya, desa merupakan tempat bagi lansia dan anak-anak, kosong atau kekurangan tenaga kerja produktif. Pada saat yang sama, beratnya kerja pertanian dan kecilnya penghasilan membuat anak-anak kehilangan mimpinya untuk menjadi petani atau hidup di desa. Hal ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu strategi yang masih relatif baru adalah proyek untuk menciptakan “desa wisata” yang mendatangkan turis lokal dan mancanegara. Untuk itu, sebagian lahan produktif dialihkan untuk membuat tempat peristirahatan, acara seni budaya disiapkan untuk menjadi hiburan, para petani berubah profesi menjadi pelayan jasa. Orientasi pada pariwisata global ternyata membuahkan kerugian dan pengangguran. Ada satu lagi orientasi pembangunan desa yang justru mematikan keragaman hayati lingkungannya. Di berbagai desa, di Kalimantan sampai NTT, orientasi desa berubah dari menggarap pertanian untuk konsumsi menjadi yang pertanian untuk komoditas ekspor. Akibatnya, keragaman hayati untuk pangan dasar, seperti berbagai jenis umbi-umbian, jagung, beras, serta tanaman kebun menjadi terabaikan dan bahkan semakin hilang. Akibatnya, kebutuhan hidup dan gizi keluarga di desa sehari-hari menjadi tidak tercukupi sampai terjadi fenomena *stunting* yang meluas.



Peradaban Desa Masa Depan

Dengan berkaca pada pembangunan desa yang cenderung memiskinkan warganya sampai saat ini, kita tidak punya pilihan lain untuk membangun arah peradaban yang berbeda di masa depan. Peradaban baru itu mau tak mau harus berbasis pada tatanan yang ramah pada alam dan lingkungan, berbasis pada komunitas yang mempunyai ketahanan pangan dan ketangguhan budaya. Peradaban yang kita bangun perlu berakar pada kekayaan budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan, wawasan, dan nilai untuk menjaga keragaman hayati, solidaritas, dan keguyuban sosial untuk saling menjaga, merawat relasi antarmanusia, dan memanusiakan manusia melalui seni dan budayanya.

Pada saat yang sama, Yunita Winarto mengingatkan bahwa kota dan desa tidak bisa didikotomikan karena sudah menjadi dua entitas yang “saling berkelindan dan tak terpisahkan – bagaikan jejaring ruwet – dengan mata rantai pasar dan alur perdagangan dari desa ke dunia”⁴.

Produsen beras mengalami kerugian karena turunnya harga jual gabah dengan tidak masuknya pedagang-pedagang besar dari kota. Penjualan beras ke pedagang-pedagang lokal menurunkan harga gabah. Mayoritas petani di lumbung-lumbung beras itu menjadi penyuplai beras masyarakat kota dan seluruh warga Indonesia yang sudah terbiasa makan nasi dan tidak lagi jagung, sagu, tiwul, dll.

4. Komunikasi melalui WA, 27 Juni 2020, berdasarkan hasil survei *online* beberapa petani di P. Jawa tentang dampak Covid-19 pada pertanian dan kehidupan masyarakat desa.

Petani hortikultura terpaksa “membuang hasil produksi sayuran” karena tidak bisa dijual ke jejaring ekspor internasional. Harga kualitas ekspor jatuh ke kualitas lokal dan terpaksa banyak yang dibuang percuma, kecuali mereka yang kemudian menyumbangkan produksinya ke mereka yang tidak bisa lagi membeli pangan untuk hidup sehari-hari. Ratusan ibu rumah tangga petani yang memproduksi jajanan dan kripik-kripik lokal mengalami penurunan drastis karena hanya bisa dikonsumsi masyarakat lokal (Yunita Winarto, 2020, komunikasi pribadi).

Ketergantungan desa terhadap agen distribusi besar di kota yang memasok keperluan nasional dan internasional. Dapatkah ketergantungan ini digantikan? Pada saat yang sama, apa yang dikonsumsi oleh masyarakat desa tidak jauh berbeda dengan di perkotaan, termasuk makanan instan dan camilan anak-anak yang tinggi MSG-nya. Pertanyaannya, “Bagaimanakah itu semua dilaksanakan dan dicapai dengan tetap mempertimbangkan bahwa kehidupan desa-kota itu saling tergantung dan menghidupi satu sama lain?” (Winarto, 2020, komunikasi pribadi).

Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah teknologi informasi dan jejaring digital sudah menjadi suatu keniscayaan yang menghubungkan satu desa di sudut bumi dengan desa atau kota di ujung bumi lainnya. Jika akses terhadap teknologi informasi dan potensi jejaring lokal-global ini dikuasai dengan baik maka desa tidak lagi terikat pada jalur-jalur distribusi dan agen-agen penghubung lama untuk memasarkan produk pertanian langsung ke berbagai



jejaring konsumen. Jejaring langsung seperti ini tentu tidak bisa menggantikan efektivitas distributor besar, tetapi bila dikelola secara kolektif dan berkelanjutan dapat membuka peluang alternatif. Daya tawar desa menjadi lebih tinggi asalkan kepentingan kolektif sudah menjadi keadaban desa sehingga warga desa tidak dengan mudah diiming-iming atau dijerat oleh godaan tengkulak atau spekulator.

Berarti yang sangat menentukan untuk membangun peradaban desa di masa depan adalah tatanan sosial atau pengorganisasian masyarakat desa secara kolektif yang melihat kesejahteraan tiap warga desa sebagai kepentingan bersama. Jika ada satu warga yang mengalami masalah, yang lain berkepentingan untuk ikut membantu mencarikan jalan keluarnya. Ada berbagai tatanan sosial khas yang menjadi genius lokal desa-desa di Indonesia, di antaranya adalah organisasi pengairan subak dan banjar di Bali yang menjadi pengatur relasi sosial yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di desa. Pengaturan tatanan sosial di desa juga sudah mempunyai perangkat hukum, yakni Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mengakui adanya desa dan komunitas adat. Walaupun di beberapa tempat terdapat dualisme antara tatanan formal dan tradisional yang bisa saling menunjang atau bermasalah, asas musyawarah untuk kepentingan bersama, transparansi pengambilan keputusan, dan demokrasi dari bawah yang partisipatif sejak dekade terakhir telah berkembang di berbagai desa di Indonesia. Selain tatanan formal dan tradisional, peran pemimpin informal, pegiat budaya, pemuka adat dan agama dalam membangun komunikasi dan membuat terobosan



kreatif bersama warga tidak bisa diabaikan. Peradaban desa di masa depan bertumpu pada berfungsinya pengorganisasian sosial yang sehat dan bergairah di desa.

Nilai kegotuyuban sosial dan kolektivitas di desa, terutama di desa adat, juga terkait dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang berkembang di desa. Perlu ditekankan di sini bahwa tradisi dan budaya lokal bukanlah sesuatu yang bersifat baku, esensial, dan statis, melainkan sesuatu yang dinamis berproses sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, prinsip bahwa kebudayaan berfungsi untuk memanusiakan dan membawa keadaban bagi manusia sangat penting untuk digarisbawahi. Artinya, budaya berfungsi untuk menunjang kemanusiaan, bukan sebaliknya, kemanusiaan dikalahkan demi kelangsungan suatu tradisi. Di saat pandemi, berbagai adat dan tradisi harus disesuaikan dengan aturan untuk menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Adat dan tradisi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak membebani warganya. Di beberapa wilayah di Indonesia ada sejumlah ketentuan adat yang berdampak negatif pada masa depan generasi muda desa. Salah satu contoh adalah kewajiban memenuhi kebutuhan ritual yang cukup besar dan yang kerap kali diadakan dalam setahun, sehingga warga memilih untuk menyerahkan ternak dan bahan pangan demi keberlanjutan tradisi dengan risiko mengurangi asupan gizi anak dan perempuan hamil. Akibatnya, muncullah gejala *stunting* atau pertumbuhan yang terhambat pada balita, suatu masalah yang mengancam masa depan bangsa secara keseluruhan.



Demikian pula beban sosial di desa (untuk khitanan, perkawinan, pendidikan anak-anak) tak urung telah mendorong migrasi TKW ke kota dan mancanegara. Tantangannya adalah membangun budaya yang memajukan keadaban dan kemanusiaan, memberi kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan, merangkul keragaman dan perbedaan, memajukan yang tertinggal, dan memberikan suasana damai akan membuat desa menjadi rumah yang nyaman bagi semua.

Membangun desa yang nyaman bagi semua berarti membuat desa menjadi daya tarik dan peluang bagi generasi mudanya untuk mengembangkan kapasitas, bakat, dan potensinya untuk menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri. Untuk itu, desa perlu menjadi peluang ekonomi yang memberdayakan dan memberikan harga diri bagi warganya. Pada saat pandemi, terjadi migrasi balik ke desa. Bagaimana membalikkan “beban” dari kota ini untuk menjadi peluang mengembangkan ekonomi desa? Saat ini masih kuat stereotip petani sebagai profesi yang kurang diminati karena menuntut kerja fisik yang keras dan memberikan nilai ekonomi yang kecil. Tantangan peradaban desa adalah membongkar dan membalikkan stereotip tersebut. Generasi muda desa yang sudah mendapatkan ilmu di kota dapat mengembangkan teknologi pertanian yang membuat kerja pertanian menjadi efektif dan menyenangkan. BUMDes dimotori oleh anak muda berjiwa wiraswasta yang dapat mengolah sumber daya dengan sistem koperasi yang menyejahterakan warga.

Sementara itu, beberapa desa telah mengembalikan konsep lumbung untuk menjadi sumber kehidupan bersama. Lumbung



dengan berbagai istilah lokal “leuit” di Bahasa Sunda, “sopo” di Bahasa Batak, merupakan praktik kolektif untuk mengamankan kebutuhan pangan. Lumbung biasanya berupa bangunan bertingkat untuk menyimpan gabah hasil panen. Lumbung desa merupakan upaya kolektif “menabung” sumber daya untuk pengamanan kebutuhan warga, khususnya di kala paceklik. Saat ini lumbung desa bisa diartikan secara metaforis, bukan harfiah, bagi kegiatan kolektif tersebut, dari mengumpulkan sumbangan bahan pangan kering sampai kebutuhan pokok lainnya. Konsep lumbung ini terkait dengan kemandirian pangan desa. Prinsip ini sangat penting ditekankan agar desa tidak lagi menjadi tempat menanam komoditas ekspor dan melupakan kebun dan keragaman hayatinya yang sesungguhnya penting untuk kesehatan dan pertumbuhan generasi mudanya. Bahkan tiap desa seyogianya menjadi “laboratorium keragaman pangan” dan dengan bantuan ilmuwan asal desa masing-masing bisa menemukan hasil budi daya lokal yang menjadi andalan desanya. Gerakan ini membalikkan kecenderungan selama revolusi hijau ketika pemerintah menyeragamkan bibit dan meredusir petani sekadar menjadi pekerja di sawah, bukan menjadi ilmuwan penemu bibit lokal. Salah satu contoh upaya transdisiplin untuk membangun pengetahuan petani terlihat dalam program “Warung Ilmiah Lapangan” dan film “Bisa Dewek” yang diprakarsai oleh Prof.



Yunita Winarto dari Departemen Antropologi, FISIP UI (Winarto, 2011⁵; Taquiuddin, 2017⁶).

Beberapa desa yang difasilitasi oleh Kemendesa mengembangkan istilah “Lambung Budaya Desa” untuk mendata berbagai sumber daya budaya yang dimiliki oleh desa, termasuk warisan seni dan tradisi, objek-objek bersejarah, ingatan kolektif tentang sejarah desa dari para tetua desa, kuliner lokal, bahasa, permainan anak, pengobatan tradisional, dan berbagai inovasi kreatif desa (Budianta, et al, 2019)⁷. Melalui sistem musyawarah yang partisipatif, warga mencari potensi budaya yang dapat diolah untuk menjadi sumber penghidupan, yang juga terkait dengan identitas dan kekhasan desa. Desa kemudian membuat organisasi dan proses untuk mengolah sumber daya budaya agar dapat menghidupi desanya, baik sebagai sarana membangun kebersamaan yang menggembirakan dan menyejahterakan.

Berbeda dari konsep desa wisata yang menjadikan desa sebagai lokasi untuk berwisata, pengolahan seni budaya desa ditujukan untuk menjadikan desa sebagai lambung pengetahuan dan lambung budaya yang pertama-tama menghidupi warganya dan yang dapat

-
5. Winarto, Yunita T. 2011. *Bisa Dewek: Kisah Perjuangan Petani Pemulia Tanaman di Indramayu: kolaborasi antropologi-petani dalam karya etnografi*. Depok: Gramata Publishing.
 6. Taquiuddin, M. 2017. “Struktur Sosial dalam Perubahan: Implikasi Pembelajaran Agrometeorologi dalam “Warung Ilmiah Lapangan” pada Dinamika Petani Tadah Hujan di Pulau Lombok.” Disertasi Doktor. Depok: Universitas Indonesia.
 7. Budianta, M. et al. 2019. *Modul Pemberdayaan Desa Berbasis Adat dan Budaya*. Jakarta: FIBUI dan Kemendesa.



dibagikan bagi orang dari luar desa untuk belajar dari desa tersebut. Beberapa pegiat desa membalikkan konsep desa wisata menjadi wisata desa (Djanaan, 2018)⁸. Dengan demikian, desa menjadi pusat pengetahuan untuk budaya pertanian berikut seni tradisi yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari warganya. Dengan demikian, warga tidak sekadar membuat “tontonan” atau menjadi penyedia jasa bagi turis yang datang, tetapi menjadi subjek pemilik pengetahuan, adat, dan budaya yang hidup dan berkelanjutan.

Ada berbagai desa yang sudah mempraktikkan konsep ini dengan berhasil. Desa Ledokombo, misalnya, pada awalnya adalah desa pemasok tenaga migran, meninggalkan anak-anak dalam asuhan kakek neneknya. Melalui inisiatif aktivis budaya dan pemimpin informal, desa membangun pusat bermain anak-anak (yang diberi nama dalam Bahasa Madura, *tanoker*, berarti kepompong). Di sana anak-anak diajak untuk menghidupkan kembali permainan egrang secara kreatif dan inovatif, suatu permainan tradisional yang selama ini telah ditinggalkan karena anak-anak terpaku pada gawainya masing-masing. Dari permainan egrang desa itu mengembangkan berbagai inovasi, termasuk festival egrang tahunan dan Sekolah untuk Kakek dan Nenek. Dengan bergairahnya kehidupan desa, pekerja migran mulai tertarik untuk pulang dan mengembangkan

8. Djanaan, Bachtiar M. 2018. “Wisata Desa, bukan Desa Wisata” dalam *Meniti Arus Lokal-Global: Jejaring Budaya Kampung*. Depok: Infermia, hal. 83-87.



berbagai usaha di desa, termasuk bisnis kuliner lokal (Budianta dan Hapsarani, 2017)⁹.

Jika desa telah menjadi lumbung pengetahuan yang menghidupkan berbagai warisan budaya lokal yang relevan dan berkesesuaian dengan perubahan zaman maka anak-anak akan tumbuh sebagai generasi yang tidak tercerabut dari akar dan lingkungannya. Artinya, desa dapat membangun sekolah-sekolah alternatif yang membuka seluruh desa menjadi ruang belajar bagi anak-anak, termasuk lahan pertanian, kebun, dan peternakannya. Guru-guru yang mencerahkan dan memotivasi akan membangun daya kritis dan kemampuan literasi anak untuk mencintai tiap sudut desa dan merawatnya, dan pada saat yang sama berselancar secara digital dengan canggih untuk menaklukkan dunia dari desa.

Menahan Pandemi: Membangun Ketangguhan Komunitas

Serangan pandemi yang berawal dari kota dan kemudian menyebar ke desa membuat desa ikut menjadi rentan. Pada saat yang sama desa memiliki sejumlah potensi yang membuatnya menjadi “garda terakhir” penangkal pandemi. Ketangguhan desa dapat dibangun dengan cara:

Menguatkan tatanan sosial di desa: Desa yang memiliki sistem pengawasan komunitas yang efektif, ramah, dan didukung seluruh

9. Budianta, Melani dan Dhita Hapsarani. 2018. *Meniti Arus Lokal-Global: Jejaring Budaya Kampung*, Depok: Infermia.



warga akan menjadi desa yang tangguh. Sistem ini perlu ditunjang oleh fasilitas rawat dan jaga warga di lokasi aman yang disediakan oleh desa/komunitas, adanya sistem lumbung pangan kering untuk kebutuhan darurat, dan sistem penghubung yang efektif dengan lembaga kesehatan masyarakat (puskesmas, rumah sakit), kepolisian, pemadam kebakaran, aparat komunitas, dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kedaruratan. Desa juga perlu memiliki jejaring transdisiplin dengan para pemimpin informal, pegiat seni budaya, pemuka agama setempat, dan komunitas lainnya. Yang tak kalah penting adalah sistem untuk memediasi konflik dan membangun solidaritas lintas batas, serta tatanan yang ramah anak, perempuan, lansia, dan penyandang cacat.

Menguatkan sistem nilai/tradisi: Desa yang tangguh memiliki nilai dan sistem gotong royong antarwarga untuk kesejahteraan bersama dan memiliki solidaritas dan empati terhadap orang lain. Desa melalui berbagai komunitasnya dapat mengajak warganya untuk membangun sikap disiplin, perilaku sehat, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan aturan yang berlaku, serta memiliki perspektif yang inklusif, berkesetaraan, dan berkeadilan.

Menguatkan sistem pengetahuan lokal: Melalui konsep lumbung desa, desa dapat menghimpun memori kolektif (pagebluk di masa lampau), kosa kata tentang wabah dan pencegahannya, pengobatan tradisional, inovasi lokal untuk teknologi kebersihan, pengetahuan, kesenian, ritual, dan pendidikan untuk menyelaraskan diri dengan alam.



Penutup: Dari Desa untuk Indonesia dan Dunia

Peradaban desa yang kita bangun yang tahan bencana merupakan arus balik yang berlawanan dengan kapitalisme global. Kapitalisme global bertumpu pada persaingan bebas dan telah membangun kesenjangan pada yang tidak punya akses dan kapital sosial dan ekonomi cukup untuk bermain secara setara. Sebaliknya, keadaban di desa dibangun atas dasar tatanan ekonomi “gotong royong” yang menyejahterakan warga, tatanan sosial yang inklusif, partisipatif, dan terbuka bagi kolaborasi dengan berbagai pihak. Tatanan politik yang memiliki keadaban tidak bersifat *top down*, melainkan partisipatif, mengedepankan musyawarah, dan transparansi pengambilan keputusan. Pendidikan yang memajukan keadaban desa adalah pendidikan yang berakar pada harkat diri yang berakar pada budaya lokal dan pada saat yang sama tersambung untuk berdialog dan menimba pengetahuan secara global.

Dengan ketersambungan desa secara digital, jejaring komunitas desa menjadi sarana penting untuk proses saling belajar antardesa dan sekaligus juga membangun kemitraan ekonomi (saling tukar produk antardesa), dan solidaritas kebangsaan. Dapat dibayangkan bagaimana anak desa di Jawa berdialog dengan rekannya desa di Aceh dan Papua untuk menimba ilmu dan bekerja sama membangun lumbung Indonesia.

Yang tidak dapat ditawar lagi lumbung Indonesia itu berisi kekayaan sumber daya alam yang dirawat dengan rasa hormat dan kasih sayang melalui kesenian dan berbagai ritual yang menyelaraskan



manusia dengan alam sebagai rasa syukur kepada pencipta-Nya. Prioritas terhadap keberlangsungan ekologi perlu menjadi komitmen bukan saja warga desa, tetapi setiap warga Indonesia, pejabat, dan pemerintahnya. Godaan uang untuk mengalihkan lahan menjadi ruang konsumsi adalah kejahatan besar yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, peran warga dan media massa sangat penting untuk mengawasi kebijakan aparat di berbagai tataran. Permainan politik di tingkat pusat dan lokal akan selalu ada di era apa pun. Meskipun demikian, jika warga sadar hukum, melek politik, dan kuat wawasan serta literasi kritisnya maka pengawasan dari bawah akan dengan sendirinya membatasi ruang gerak para pencuri kepentingan.

Untuk mewujudkan tatanan baru yang berpusat pada peradaban desa dibutuhkan kerja sama dari berbagai kalangan, dari dalam dan luar desa. Pegiat budaya, komunitas adat, aparat desa, pemerintah pusat, pebisnis, akademisi, intelektual, media massa, jejaring antardesa perlu berkolaborasi dan membangun kemitraan dengan prinsip saling mengisi dan menguatkan. Kerja sama tersebut juga bersifat lintas sektoral, transdisiplin (juga transnasional), dan tidak berbasis proyek, tetapi bertujuan menguatkan desa secara holistik demi masa depan Indonesia dan dunia.[]



Profil Penulis

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini jatuh cinta pada sastra sejak kanak-kanak. Pada usia 12 tahun, Melani Budianta memenangkan lomba mengarang cerita anak yang diadakan majalah *Si Kuncung*. Karya kritik dan esainya tersebar di berbagai majalah dan koran. Serta menulis pengantar untuk sejumlah buku sastra, seperti pada novel *The God of Small Things*. Selain itu, ia juga menjadi editor di Jurnal Studi Budaya Antar Asia dan “Lontar”.

Lahir di Malang, Jawa Timur, ia mengawali pendidikan tingginya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1979. Lalu, lanjut ke *University of Southern Carolina* dan menyangand gelar M.A. dalam Bidang Kajian Wanita Wilayah Amerika sejak 1982. Gelar Ph.D. dalam Bidang Kesusastraan ia peroleh dari *Cornell University* Amerika Serikat pada tahun 1992. Pada 2005, ia mendapat gelar profesor dari Universitas Indonesia.

Hingga kini masih aktif menulis, menjadi pemakalah, dan narasumber dalam berbagai perhelatan sastra. Karyanya antara lain *Syahrir and the Childern of Bandaneira A Hurried Life of Journalist, Teori Kesusastraan* (terjemahan karya Rene Wellek), *Kado Istimewa* (antologi cerpen yang ditulisnya dengan nama Santryarini), dan “Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia” (Bunga Rampai Esai Indonesia Horison 2002).





Saatnya Desa Menyerbu Kota¹

Budi Arie Setiadi

Pola lama perpindahan kelompok masyarakat dari desa ke kota karena motif ekonomi maupun berbagai motif lainnya rasanya harus diputar balik sekarang juga. Selama ini menjadi “lumrah” di benak sebagian besar masyarakat bahwa kota adalah sumber penghidupan dan pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik, lebih mapan. Dan tak jarang kita berpikir bahwa desa adalah tempat yang kusam, suram, terbelakang, jauh dari kemilau ingar

1. Disarikan oleh Iswan Heri

bingar kemajuan kehidupan modern perkotaan. Terlampau sedikit anak muda yang bermimpi membangun desa jika dibandingkan dengan mereka yang mengadu nasib dan hidup di kota. Sekian lama kita hidup dalam pola pikir yang demikian. Hingga tiba masanya pandemi Covid-19 menghantam seluruh sendi kehidupan sedemikian keras. Cina, Amerika, Italia, dan negara-negara lainnya limbung bak dihantam tsunami besar. Kali ini bukan ombak air raksasa yang datang, tetapi ombak tak kasat mata yang menyapu seluruh tatanan kehidupan modern yang diimajinasikan banyak orang. Bukan industrialisasi atau otomatisasi yang akan mengubah pola hidup manusia, tetapi ternyata sebuah virus kecil belaka. Virus kecil yang lambat laun tumbuh menjadi raksasa.

Wabah Covid-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 lalu memaksa kita mengarahkan pandangan pada desa, sebuah ruang hidup yang selama ini sering dilupakan. Di saat kota menjadi limbung karena perekonomian terhambat dan mobilitas masyarakat dibatasi serta berakibat pada pembelian besar-besaran stok persediaan pangan, kita dipaksa kembali mengingat bahwa kepanikan akan keberadaan stok pangan jarang terjadi di desa. Desa memiliki mekanisme lumbung pangan yang selalu siap dijadikan bantalan pengaman pangan warga di saat paceklik tiba. Kini paceklik itu tidak hanya dialami kaum petani pedesaan, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kota-kota dengan ciri khas modernisasinya. Pandemi Covid-19 seolah menjadi guru seluruh umat manusia bahwa modernitas tak selamanya bisa menjadi solusi



akan tumbuh kembang peradaban manusia. Sinergi dengan alam dan manajemen stok pangan yang selama ini berjalan di desa bisa jadi menjadi kunci penting untuk keluar dari wabah yang entah kapan akan berhenti ini.

Desa Sebagai Pusat Ekonomi Baru

Modernitas yang bertumpu pada industrialisasi ternyata tidak cukup kuat melawan pandemi. Dari Asia hingga Eropa, kenyataan pahit akan goyahnya perekonomian karena pandemi harus ditelan mentah-mentah. Beruntungnya kita karena memiliki desa dengan dinamika ekonomi yang berbeda dengan kota. Desa-desanya di Indonesia kebanyakan bercorak agraris. Pertanian dan kegiatan ekonomi yang bersumber dari alam, seperti perikanan maupun peternakan menjadi pembeda dengan aktivitas ekonomi di kota. Dengan mekanisme seperti ini desa terbukti punya daya tahan pangan yang relatif lebih baik daripada masyarakat perkotaan. Bahkan apabila stok pangan di desa mencukupi, ia sanggup menjadi bantalan stok pangan bagi kota. Namun, tentu saja perlu ada rejuvenasi pertanian maupun distribusi hasil pertanian agar mampu berjalan optimal dan berkembang di masa depan.

Teknologi adalah salah satu kunci penting agar pertanian di Indonesia bisa kembali menjadi primadona. Penggunaan teknologi ini setidaknya harus dilakukan pada dua aspek, yaitu aspek produksi dan aspek distribusi.



Pada aspek produksi, pertanian modern mensyaratkan pertanian yang dikelola secara efektif sekaligus tetap memperhatikan sisi keberlangsungan alam di masa depan. Teknologi pada pertanian organik adalah salah satu contoh tentang bagaimana pertanian tetap berjalan secara produktif dan kelestarian alam tidak dilupakan. Penggunaan obat-obatan dan pupuk kimia yang mempunyai potensi mengurangi nilai guna tanah di masa depan mulai digeser oleh pupuk dan obat berbahan alami dan ramah dengan alam. Kelestarian alam adalah kunci jika kita ingin memastikan sektor pertanian tetap bertahan dan berumur panjang.

Sembari meningkatkan sisi produksi yang ramah alam, kita juga harus menggenjot sisi distribusi. Ramainya penjualan *online* di Indonesia seharusnya bisa dijadikan peluang oleh sektor pertanian untuk memperluas pasar dan jangkauan. *Pasardesa.id* yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat Panggungharjo, Yogyakarta patut kita jadikan contoh. Kurang lebih 400 UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan *handycraft* yang tergabung dalam situs jual beli tersebut bisa menjadi jalan alternatif untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat pada bahan pangan yang segar dan berkualitas. Jual beli *online* secara langsung antara penjual dan pembeli juga dapat memotong rantai penjualan melalui tengkulak yang sangat merugikan petani. Di sisi lain, jual beli *online* juga menguntungkan dari sisi kesehatan karena mengurangi tatap muka antarorang per orang.



Nah, jika skema sedemikian sudah berjalan maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah dukungan dari konsumen khususnya masyarakat perkotaan. Masyarakat di kota tak perlu lagi melakukan *panic buying* karena takut kehabisan stok pangan, lantaran desa sanggup menjamin ketersediaan stok bahan pangan hari ini dan masa mendatang. Membeli produk-produk pertanian desa adalah langkah taktis dan menguntungkan bagi masyarakat, baik di desa maupun di kota sekaligus sebagai langkah yang tepat agar roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Problematika Dana Desa

Situs jual beli berbasis lokal seperti *pasardesa.id* bersumber dari dana desa. Dengan perencanaan dan kalkulasi yang matang, inisiatif semacam ini sangat mungkin dilakukan. Inisiatif pemerintah desa jelas dibutuhkan di sini. Namun, yang tidak kalah penting adalah inisiatif dan kreativitas masyarakat desa dalam membuat dan mengelola dana desa agar tepat guna dan tepat sasaran. Inisiatif warga desa juga dapat menjadi media pengontrol bagi aparat desa agar mengelola dana desa secara cermat, tepat, dan transparan. Apabila hal ini dapat berjalan maka wajah desa yang demokratis dan modern bisa segera terwujud.

Berdasarkan pantauan kami selama di lapangan, ada tiga belas ciri pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan transparan, yaitu tidak ada papan proyek, laporan realisasi sama persis dengan RAB, pengurus lembaga desa seluruhnya adalah keluarga kades,



BPD mati suri, kades memegang semua keuangan desa, perangkat desa yang jujur dan vokal dipinggirkan, banyak kegiatan mundur pelaksanaannya dari jadwal yang ditetapkan, peserta musdes sedikit dan hanya itu-itu saja, BUMDes tidak berkembang, belanja barang dan jasa dimonopoli kades, tidak ada sosialisasi kegiatan terhadap masyarakat, pemdes marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa, serta kades dan perangkat desa dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan biaya ratusan juta rupiah, tetapi tidak sepadan apabila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang dimilikinya.

Tiga belas permasalahan tersebut mungkin hanya sebagian kecil saja yang bisa diamati dari permasalahan desa yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa bisa menjadi sarana pembelajaran mengenai demokratisasi anggaran di tingkat desa. Dana yang diperoleh bersama, dikelola bersama, serta diawasi bersama penggunaannya. Dana desa ini bisa menjadi sarana kemajuan maupun tantangan bagi pemerintah desa dan warga masyarakat. Pola pemerintahan yang baru adalah transparansi dan akuntabilitas. Sudah bukan zamannya lagi anggaran dikelola secara sembunyi-sembunyi. Bahkan jika dimungkinkan penggunaan dana desa bisa saja ditampilkan di *website* desa demi menjaga asas transparansi.

Masa Depan Desa di Era *New Normal*

Setelah menimbang potensi dan tantangan yang dihadapi desa, rasanya harapan positif tetap harus ditumbuhkan menuju hari-hari ke depan. Masa depan umat manusia pascapandemi ini memang serba tidak pasti. Namun, di tengah ketidakpastian ini setidaknya kita belajar kembali untuk berinovasi dalam rangka mempertahankan keberlangsungan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang utuh tidak hanya mepedulikan nasibnya sendiri, tetapi juga memiliki kepekaan sosial sebagai sesama anak bangsa. Sudah saatnya desa dan kota menjalin relasi baru yang lebih sehat dan ideal.

Ada tiga kunci penting kemajuan desa, yaitu ketersediaan generasi muda di desa yang cukup, SDM yang kreatif dan inovatif, serta partisipasi aktif warga pada pembangunan desa. Jika diringkas, kemajuan desa bersumber pada kualitas SDM yang kreatif, inovatif, serta berintegritas tinggi. Kaum muda menjadi perhatian di sini mengingat kaum muda menjadi penerus estafet kepemimpinan dan visi pembangunan desa ke depan. Banyaknya kaum muda yang kurang berminat pada sektor pertanian dan memilih pergi ke kota tentu menjadi tantangan terbesar di sini. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu kerja sama berbagai pihak agar dapat menaikkan pamor sektor pertanian serta membuat kaum mudanya betah tinggal dan mengelola desa. Pertanian desa perlu digenjot baik kualitas maupun kuantitasnya, selain itu perlu dukungan di sektor pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi kecurangan oleh tengkulak.



Apabila ekosistem pertanian dan perekonomian desa dapat terbentuk dengan baik maka desa bisa menjadi pelopor dan motor penggerak pemulihan ekonomi bangsa ke depan. Desa sanggup menyediakan kebutuhan bahan pangan yang tidak diproduksi di kota, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Di sisi lain, kota juga bisa melakukan timbal balik dengan mengirimkan hasil produk yang tidak tersedia di desa, seperti gas LPG serta perlengkapan teknologi pertanian (traktor, komputer, dsb). Dengan demikian, roda perekonomian desa dan kota dapat berjalan beriringan demi tercapainya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Memasuki era *new normal* yang sudah di depan mata setidaknya desa perlu mempersiapkan diri untuk menyusun produk-produk kebijakan yang strategis dan menjawab tantangan zaman. Kebijakan desa di era *new normal* sebaiknya memiliki empat nilai mendasar, yaitu ditetapkan dalam perdes sebagai landasan norma baru desa, ditetapkan dalam musyawarah desa, bertumpu pada kearifan lokal, dan berisi kompilasi protokol *new normal* untuk desa. Melalui musyawarah desa yang terbuka dan egaliter, masyarakat dapat lebih menggalang nilai-nilai demokrasi serta dapat berkontribusi aktif dalam perencanaan dan pembangunan strategis di desa ke depan. Masyarakat juga dapat memilih dan menyusun program prioritas bagi hajat hidup masyarakat desa itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah desa juga dituntut untuk bersikap lebih terbuka dan transparan terkait anggaran dan program desa ke depan. Jika hal tersebut

dapat terjadi maka tiga belas persoalan terkait anggaran atau dana desa lambat laun bisa dihindari. Bencana Covid-19 ini tidak dapat diselesaikan oleh satu-dua orang saja. Kolaborasi positif antara warga masyarakat dan pemerintah lambat laun akan menuntun kita menuju jalan terang di tengah ketidakpastian hari ini.[]



Profil Narasumber

Jiwa aktivisnya saat mahasiswa membuat ia peka pada pembangunan desa. Menurutnya, banyak desa yang maju dan mandiri karena digerakkan oleh anak-anak muda karena anak muda cenderung lebih kreatif dan inovatif. Saat kunjungan ke desa-desa, Budi Arie Setiadi selalu mendukung pengembangan ekonomi desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyak produk unggulan di desa yang ia nilai layak menyerbu kota. Konsentrasinya tersebut mengantarkan ia menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019.

Semasa reformasi 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI, ia membidani lahirnya Keluarga Besar UI. Lalu, mendirikan surat kabar *BERGERAK* di tahun yang sama. Sebelumnya, di rentang 1994-1996, bersama wartawan *Majalah Tempo* yang saat itu dibredel, Budi turut mengelola mingguan *Media Indonesia*. Bersama beberapa jurnalis senior, ia menjadi tim awal berdirinya mingguan ekonomi *Kontan* dari 1996 hingga 2001.

Budi merupakan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) dan Presidium Senat Mahasiswa UI periode 1994-1995. Ia juga aktif di pers mahasiswa UI *Majalah Suara* hingga menjadi redaktur pelaksana tahun 1993-1994. Selepas dari almamaternya, ia dipercaya menjadi Ketua ILUNI UI Jakarta (1998-2001). Kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI).





Paradoks Membangun Daya Hidup Desa: Membaca Era Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0

Garin Nugroho

Era revolusi teknologi 4.0 dan 5.0 dewasa ini ditandai dengan berbagai kegelisahan menyangkut beragam percepatan yang mempengaruhi daya hidup desa. Sebutlah percepatan urbanisasi, percepatan penguasaan tanah di luar pertanian, percepatan impor hasil bumi dalam perspektif produktivitas desa hingga mundurnya

peran petani dan pertanian maupun percepatan pertanian modern serta perubahan gaya hidup desa. Namun, di sisi lain pandemi telah membawa fenomena dibutuhkannya kembali produk-produk desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus kecerdasan bangsa maupun isu lingkungan, hingga warisan budaya serta hubungan teknologi baru dengan daya hidup desa.

Salah satu cara membaca masa depan adalah menengok ke belakang untuk membaca bagaimana daya hidup bangsa Indonesia mengelola momentum perubahan di setiap periode sejarah, khususnya dalam hubungan daya hidup desa dengan revolusi industri berbasis teknologi yang selalu hadir dan tidak bisa kita tolak kehadirannya di setiap perubahan zaman.

Membaca bagaimana desa di Indonesia dinarasikan di era revolusi industri 1.0 (abad 18) ditandai dengan mesin uap serta pergantian tenaga manusia dengan mesin maka akan terbaca Indonesia yang dahulu disebut Hindia Timur di era VOC dinarasikan lewat beragam media, mulai dari sketsa dan lukisan Raden Saleh tentang beragam jenis flora dan fauna, lukisan *moi indie*, novel Conrad tentang gambaran manusia Melayu, catatan perjalanan, sketsa perang – sebutlah perang Jawa, catatan riset, iklan turisme, maupun foto-foto.

Dengan kata lain, keindonesiaan di era 1.0 dinarasikan oleh beragam bentuk media, layaknya perspektif jurnalisme era 4.0 yang menuntut jurnalisme dalam perspektif multimedia, yaitu menggabungkan teks, suara, hingga visual.



Sejarah juga mencatat revolusi teknologi senantiasa melahirkan paradoks, sebutlah antara lompatan vs ketertinggalan, harapan vs tragedi, penemuan vs kehilangan, hingga penguasaan teknologi vs ketimpangan akses.

Pertanyaan sederhana muncul, apakah bentuk-bentuk narasi di era 1.0 tersebut mampu menarasikan realitas sosial, ekonomi, dan politik periode awal liberalisme ekonomi terbesar tersebut, khususnya dalam kehidupan warga desa?

Sejarah mencatat liberalitas ekonomi berbasis revolusi industri 1.0 menunjukkan hilangnya narasi perihal realitas, ketimpangan, hingga ketidakpuasan sosial ekonomi beserta tragedi kemanusiaannya. Kesemua itu bertumpu pada kehidupan desa di Indonesia yang menjadi sumber hasil bumi bagi kepentingan revolusi industri.

Sejarah menunjukkan sejak revolusi industri 1.0 banyak negara Eropa bertumbuh pesat kesejahteraan ekonominya untuk membangun serta menata dasar struktur serta superstruktur peradaban baru. Sebutlah kekayaan VOC sebagai korporasi ekonomi liberal terbesar dalam sejarah – kekuasaan VOC melebihi kekuasaan ekonomi Microsoft sekarang ini maupun PetroChina hingga Arab.

Peradaban menunjukkan bahwa realitas ekonomi dan sosial di Hindia Timur saat itu menunjukkan sebaliknya. Banyak aspek hilang dalam narasi abad itu yang kesemuanya bertumpu pada daya hidup desa.



Pertama, masyarakat desa kehilangan tanahnya dan bekerja sebagai buruh di perkebunan untuk tanaman ekspor, tetapi upah tidak cukup memadai untuk batas minimum kehidupan.

Kedua, masyarakat desa kehilangan akses terhadap modal dan produktivitas dikuasai elite ekonomi dan politik, yakni Cina dan Barat.

Ketiga, liberalisme ekonomi dan kapitalisme dengan daya pegas revolusi teknologi baru ternyata tidak cukup memberi kesejahteraan umum masyarakat desa. Sebutlah mesin uap lewat kereta api dan kapal serta infrastruktur jalan justru menjadi kepanjangan global untuk mengambil kekayaan dan memeras tenaga rakyat desa yang semakin tidak sejahtera.

Warisan di atas selayaknya diberi garis bawah sendiri di tengah awal revolusi 4.0. Inilah sebuah warisan revolusi industri 1.0 yang sangat kompleks, yang jejaknya pasti terus hidup hingga sekarang dengan perubahan beragam perspektif. Meski harus diakui revolusi industri 1.0 melahirkan manusia *genuine*, meski sedikit, tetapi mampu melahirkan negara ini beserta kelengkapan pertumbuhannya sebagai sebuah bangsa.

Momentum Penuh Paradoks

Salah satu dasar pertumbuhan peradaban bangsa adalah kemampuan mengolah kebangkitan di setiap momentum perubahan untuk meletakkan dasar struktur dan superstruktur bagi peta

baru peradaban. Dengan bangunan dasar di setiap perubahan, sebuah bangsa mampu mendobrak secara struktural ketidakadilan serta ketimpangan sosial ekonomi. Dengan demikian, teknologi baru bukan sekadar menjadi euforia narasi penuh jargon, menjadi narasi semu untuk menutupi ketidaksiapan dan ketidakmampuan menghadapi zaman baru. Pada proses ini maka bangunan karakter bangsa, baik nilai keutamaan individu maupun keutamaan bermasyarakat setiap warga akan mengalami penguatan, perluasan, dan terus mentransformasi diri. Misal, nilai gotong royong, kompetitif, atau juga nilai keterbukaan.

Lewat kekayaan yang bertumbuh secara eksponensial di era liberalisme ekonomi 1.0, sebagian besar bangsa Eropa mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk menumbuhkan masyarakat sipil yang produktif dan kritis sekaligus membangun manajemen talenta manusia beragam profesi, menghidupkan daya hidup desa dalam relasinya dengan pertumbuhan kota-kota, dan proses produktivitas berbangsa.

Sementara di Indonesia terbaca sebuah kenyataan bahwa setiap periode pertumbuhan ekonomi menjadikan revolusi industri berbasis teknologi tidak bertumbuh linier, tetapi campur aduk, paradoks, serta penuh guncangan dengan dampak sering tak terkendali. Sebutlah meski abad 21 ini disebut sebagai revolusi industri 4.0 ditandai dengan *internet thinking* dan *online*, tetapi realitas sehari-hari didominasi campur aduk karakter industri 2.0 dan 3.0. Perlu



dicatat era 2.0 ditandai dengan listrik dan industri massal, sementara era 3.0 ditandai dengan komputerisasi dan otomatisasi.

Bisa diduga situasi campur aduk penuh paradoks ini melahirkan kehilangan serta ketimpangan di berbagai sendi kehidupan berbangsa yang kompleks. Sebuah fenomena yang masuk dalam kehidupan desa-desa.

Catatan khusus perihal kehilangan dan ketimpangan bisa dilihat di era Presiden Soeharto. Adalah kenyataan bahwa segalanya serba komando, terpusat, dan terkontrol. Sebutlah institusi-institusi data, informasi, dan narasi berbangsa dikuasai oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat sipil. Narasi menjadi tunggal dan seragam sesuai dengan keinginan kekuasaan. Pada satu sisi terbaca pertumbuhan desa dan infrastruktur terasa sangat diperhatikan, tetapi daya kritis dan partisipatif tanpa politik komando terasa kehilangan daya hidupnya.

Sejarah mengajarkan bahwa tanpa bangunan masyarakat sipil (termasuk desa) yang kritis, sehat, dan produktif maka setiap periode perubahan zaman senantiasa melahirkan kehilangan dan krisis beragam di kehidupan bermasyarakat.

Sebutlah pada aspek daya hidup budaya populer era 1990-1998 ketika lahir televisi swasta, internet, dan globalisasi lewat satelit menjadikan informasi serta berbagai narasi tidak bisa dikontrol untuk masuk Indonesia. Krisis dan kematian komunikasi nilai-nilai keutamaan publik termasuk desa mulai bertumbuh.



Berkait uraian di atas maka catatan penting adalah aspek kebanalan media televisi pasca 1998 di tengah euforia demokrasi pascalengsernya Soeharto. Inilah era televisi menjadi primadona, melahirkan era masyarakat televisi serta era masyarakat hiburan. Akibat lebih jauh, komunikasi publik berkait daya hidup desa kehilangan ruang pertumbuhannya.

Era televisi yang banal dengan etika rendah menjadikan warga bukan warga negara, melainkan warga penonton sekaligus warga penggemar dan warga konsumen. Warga desa kehilangan komunikasi nilai publik berbangsa.

Merebut Momentum

Periode setahun ini begitu banyak kajian dan tulisan perihal revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini mengisyaratkan akan membawa perubahan cara hidup dan menghidupi beragam aspek kehidupan dengan beragam paradoksnya yang masuk dalam kehidupan desa-desa.

Tercatat begitu banyak perspektif kehilangan, sebutlah semakin hilangnya perspektif komunikasi pemimpin desa diganti *influencer* hingga berkait dengan waktu produktif anak muda desa yang didesak waktu penggunaan media sosial. Di sisi lain terjadi lompatan-lompatan baru yang luar biasa. Warga desa mampu mengakses informasi, fakta, dan data langsung serta membaca berbagai fenomena zaman sekaligus gaya hidup baru. Hal ini



kemudian melahirkan paradoks, yakni antara konsumerisme serta kekacauan komunikasi publik disertai mundurnya nilai-nilai karakter desa vs lompatan warga desa untuk menemukan daya hidup baru desa. Jangan lupa, jumlah pengguna internet lebih dari 140 juta hingga bertumbuhnya usia milenial hingga mencapai 35 persen.

Membaca era 2020 adalah membaca ketika teknologi kapitalis baru serba *online* melahirkan berbagai paradoks revolusi industri 4.0.

Pertama, revolusi industri 4.0 di Indonesia tumbuh tidak dalam masyarakat sipil yang mempunyai kelengkapan institusi nilai-nilai publik khususnya desa guna mampu mengolah, menjaga, menyesuaikan, dan menganalisa setiap perubahan zaman dalam kaitannya dengan realitas berbangsa di beragam sendi kehidupan.

Kedua, revolusi industri 4.0 tidak berjalan linier, tetapi campur aduk dengan warisan revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Percampuran ini melahirkan paradoks luar biasa. Oleh karena itu, membangun masyarakat adab lewat revolusi industri 4.0 selayaknya dibangun atas pembongkaran sungguh-sungguh warisan revolusi sebelumnya, menuntut beragam manajemen manusia genial yang tidak hanya bicara teknologi baru dan kemungkinan masa depan secara linier, tetapi berkait kajian kompleks yang campur aduk.

Ketiga, warisan rendahnya melek fungsi dan rendahnya etika profesi serta etika publik, baik pada media maupun politik serba massa melahirkan demokrasi dengan massa yang sulit

bertumbuh secara berkualitas. Dikhawatirkan revolusi industri 4.0 hanya menjadi penyuburan masyarakat desa dengan teknologi baru sebagai gaya hidup dan konsumerisme serta kepemimpinan desa yang dibangun bukan oleh nilai-nilai keutamaan desa, tetapi politik uang dan primordialisme ataupun politik banal lainnya.

Keempat, pandemi telah melahirkan berbagai pembacaan baru hubungan daya hidup desa, teknologi baru dan nilai-nilai ketahanan pangan, kesehatan, kecerdasan lewat gizi, hingga terjaganya nilai-nilai lingkungan hidup. Sebuah kerja kemanusiaan besar yang perlu dikaji secara serius.

Kelima, jika kerja menuju revolusi 4.0 tidak disertai membangun dasar-dasar masyarakat sipil desa yang sehat, kritis, dan produktif maka jalan-jalan digital hanyalah menjadi infrastruktur layaknya infrastruktur jalan era revolusi 1.0, menjadi jalan bagi korporasi global menguras kekayaan alam dan menumbuhkan konsumerisme.

Catatan di atas belumlah menjawab beragam paradoks relasi revolusi industri 4.0 dengan daya hidup desa, tetapi menjadi semacam renungan dalam Kongres Kebudayaan Desa ini, yakni agar semua warga bangsa berkewajiban serius mengelola momentum era milenial baru ini bagi produktivitas desa. Untuk itu diperlukan manajemen generasi milenial desa yang *genuine*, kritis, dan produktif dengan bekal peta kebangsaan yang lengkap.



Manajemen milenial ini bisa terbangun lewat strategi budaya milenial. Yakni cara berpikir, bertindak, dan bereaksi suatu bangsa dalam setiap periode zaman lewat kebijakan politik didukung oleh hukum dan manajemen, baik manajemen finansial, manajemen intelektual, kultural, hingga modal sosial guna melahirkan masyarakat sipil desa yang sehat dan produktif serta kritis. Di dalamnya terdapat dua aspek karakter bangsa, yakni aspek nilai-nilai keutamaan individu warga dan nilai-nilai keutamaan bermasyarakat desa dan nilai global. Sebutlah nilai gotong royong, disiplin, kompetitif, nilai sains dan teknologi, hingga toleransi.

Pertanyaan mendasar, haruskah kita melalui era pandemi ini kehilangan momentum kebangkitan karakter berbangsa untuk menumbuhkan masyarakat sipil desa yang sehat dan produktif, mengulang kembali hilangnya momentum revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0 sehingga segalanya hanya tinggal euforia maya? Semoga Kongres Kebudayaan Desa 2020 di tengah pandemi lewat teknologi baru ini menjadi salah satu ruang yang mampu memberi pemikiran sekecil apa pun mengelola momentum revolusi 4.0 guna kebangkitan daya hidup desa.[]

Juli 2020



Profil Penulis

Lebih dari 65 penghargaan film diraihnya dari berbagai festival internasional dan Indonesia. Karyanya meluas dari film, teater, tari, hingga seni instalasi.

Garin mendapatkan penghargaan peran budaya tertinggi dari berbagai negara: Pemerintah Perancis (The Ordredes Arts Des Letters), Italia (Stella D'Italia Cavaliere) hingga Presiden Indonesia dan Honorary Award Singapura International Film Festival, Life Achievement Award dari Bangkok International Festival, Walikota Kota Roma, Vaseoul – Perancis, hingga Kota Jogja.

Tercatat sebagai pelopor generasi film pasca 1990. Selain berkarya, ia menumbuhkan beragam festival seni, menulis buku, kolom di harian *Kompas* dan *Tempo*, maupun menumbuhkan NGO untuk demokrasi. Garin juga pengajar S-2 dan S-3 di ISI Solo dan Jogja.





Generasi Kembali ke Akar sebagai Tatanan Dunia Pascapandemi

Dr. Muhammad Faisal

Mendadak Milenial!

Pada tahun 2017 harian *Kompas* mengeluarkan sebuah *headline* bertajuk “Milenial Indonesia”. Sebuah liputan khusus yang menegaskan bahwa generasi muda Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Artikel dari harian *Kompas* tersebut merupakan titik mula penggunaan

istilah ‘milenial’ sebagai serapan dari kata ‘*millennials*’ dalam Bahasa Inggris. Generasi milenial dengan demikian telah dianggap sebagai realitas sosial baru di Indonesia.

Narasi milenial mendadak menjadi sebuah narasi nasional pada tahun 2017. Salah satu pemicunya adalah pemilihan umum yang diadakan dua tahun setelahnya, tepat pada tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang diwarnai oleh begitu banyak suara pemilih muda dan pemula. Dengan demikian, pemahaman tentang generasi milenial dianggap sebagai kunci dalam memenangkan pesta demokrasi pada tahun tersebut. Keberagaman corak dan karakter generasi muda Indonesia disimplifikasi melalui terminologi ‘milenial’ untuk kepentingan kampanye dan *marketing*. Anak muda merupakan *target market*, mereka menarik untuk diselidik sejauh konsumsi dan pilihan politiknya.

Mundur sepuluh tahun silam, istilah *millennials* praktis hanya digunakan oleh para pelaku *marketing*. Don Tapscott pada tahun 2008 mengeluarkan sebuah buku berbasis data perilaku konsumen untuk melukiskan kemunculan generasi *millennials* dalam buku *Digital Grown Up*. Buku dari Tapscott menjadi rujukan utama bagi tak hanya praktisi *marketing* dan *advertising* di dunia barat, tetapi juga di Indonesia. Dalam konteks riset *marketing* tidak pernah ada pembobotan yang besar pada upaya memahami permasalahan psikologi sosial anak muda dalam rangka perumusan sebuah intervensi maupun gerakan pemberdayaan. Ini karena tujuan utama



dari riset *marketing* adalah menemukan strategi paling jitu dalam meraih profit dari konsumen.

Pola pikir ‘meraih profit’ dari dunia *marketing* sayangnya turut diseret dalam pengembangan narasi milenial di Indonesia. Padahal, narasi milenial telah mengalami perluasan ranah. Narasi milenial yang tengah berkembang secara nasional tak hanya menyinggung permasalahan konsumsi, tetapi juga keterlibatan politik, estafet kepemimpinan hingga gerakan sosial. Manifestasi dari perluasan narasi milenial terlihat ketika Presiden Jokowi memperkenalkan staf khusus milenial kepada publik. Sebuah upaya memberi ruang keterwakilan berdasarkan usia juga mencairkan birokrasi negara yang kerap dianggap kaku. Publik sangat berharap keterwakilan tersebut benar-benar berlandaskan pemahaman mengenai generasi muda Indonesia yang mendalam dan bukan menggunakan pola pikir profit untuk sekadar meraih simpati segmen muda.

Perluasan Konstruksi Narasi

Pada tahun 2028 hingga 2035 Indonesia diproyeksikan akan mengalami sebuah perubahan demografi yang radikal. Yaitu sebuah bonus demografi di mana penduduk berusia produktif (15-64 tahun) akan melampaui penduduk berusia nonproduktif. Fenomena tersebut meniscayakan jumlah penduduk berusia muda (di bawah 30 tahun) akan melebihi kelompok usia lainnya. Narasi mengenai milenial yang telah didominasi pola pikir berorientasi profit mengalami sebuah evolusi yang semakin menjauhkan dari hakikat

makna pemuda ketika dikawinkan dengan narasi bonus demografi. Tak berhenti di sana, industri pasar pun tergiur saat melihat jumlah segmen muda yang demikian besar dan menjanjikan. Lantas, terjadi penambahan sebuah narasi pelengkap, yaitu revolusi industri 4.0.

Triangulasi tiga narasi besar, yaitu milenial, bonus demografi, dan revolusi industri 4.0 dianggap sebagai tiga kesatuan yang begitu kuat sehingga diyakini sebagai tatanan dunia baru bagi Indonesia di masa depan. Ketika seseorang berbicara yang satu, dua yang lainnya harus pula disertakan. Salah satu premis yang kini berubah menjadi mantra masa depan adalah digitalisasi dan otomatisasi sebagai solusi tunggal dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan milenial dalam menyongsong bonus demografi Indonesia. Sebagaimana adopsi kata milenial yang ditelan bulat-bulat dari sebuah terminologi asing, digitalisasi, *artificial intelligence*, dan otomatisasi juga diterima begitu saja tanpa adanya sebuah kajian penyesuaian terhadap kebudayaan nasional dan corak *indigenous* Indonesia.

Revolusi industri 4.0 sendiri pertama kali dipropagandakan oleh Klaus Schwab pada World Economic Forum di tahun 2015. Narasi tentang revolusi industri tersebut meniscayakan sebuah masa depan di mana setiap individu akan terhubung satu dengan yang lainnya, produktivitas meningkat karena kehadiran robotik dan otomatisasi, lantas kehidupan manusia akan lebih efisien juga maju dengan dibantu oleh *artificial intelligence*. Klaus sendiri menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan sebuah narasi, ia belum menjadi sebuah kenyataan.



Jeremy Rifkin, seorang ekonom dan penasihat parlemen Uni Eropa, salah satu penggagas ekonomi dengan orientasi rendah karbon di Jerman, mengemukakan bahwa revolusi industri 4.0 sejatinya tidak akan pernah terjadi. Sebab revolusi tersebut malah akan lebih banyak menuntut penggunaan energi berbasis fosil. Realitas yang harus dilakukan oleh industri-industri besar dunia ke depan adalah mempertimbangkan secara serius faktor *sustainability*. Yaitu dengan mendekonstruksi teknologi lama yang tidak ramah lingkungan dengan sebuah sistem yang lebih memberi ruang bagi pemulihan lingkungan hidup. Apabila hal ini tidak dilakukan maka alam akan mencapai sebuah titik kerusakan yang akan sulit dipulihkan kembali, niscaya seluruh warga dunia akan dirugikan oleh revolusi industri tersebut.

Memisahkan Teknologi dengan Narasinya

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk mengimajinasikan tatanan dunia baru ke depan adalah memisahkan teknologi dengan narasi yang membentenginya. Jaron Lanier, penggagas teknologi *virtual reality*, penulis buku *You are Not a Gadget*, serta kritikus terhadap perkembangan internet dan industri digital, menjelaskan bahwa relasi antara internet dengan Silicon Valley saat ini serupa dengan relasi gereja Katolik pada abad ke-15 dengan sains. Yaitu terjadinya peleburan otoritas keimanan dan pengetahuan pada institusi yang sama, yaitu gereja. Penyatuan tersebut akan membuat cara berpikir kritis pada masyarakat menjadi tumpul dengan

mengaminkan segala apa yang diutarakan baik oleh sains dan tokoh agama. Di tempat lain, institusi tersebut akan cenderung tertutup, bahkan memusuhi pandangan-pandangan alternatif yang berseberangan.

Kini, simpati masyarakat di tingkat global maupun nasional terhadap digitalisasi, *artificial intelligence*, dan otomatisasi cenderung positif. Pengampu kebijakan maupun pemegang modal bahkan satu suara dalam isu ini. Sulit sekali menemukan satu pun pakar teknologi informatika yang menjadi oposan maupun *devil's advocate* dalam diskursus tentang revolusi industri 4.0. Dalam kondisi tersebut, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana penetrasi digital telah mulai diadopsi dari ranah perdagangan dan transportasi ke pendidikan dan kesehatan, lalu tidak menutup kemungkinan politik dan kepemimpinan di masa yang tak lama lagi. Selama tidak ada satu pun narasi tandingan, atas nama efisiensi dan fungsi praktis digitalisasi akan terus mendominasi berbagai ruang kehidupan kita. Hal ini terjadi karena narasi tentang teknologi yang selayaknya menjadi domain publik diampu oleh pemangku kebijakan dan pemegang modal.

Kurva Eksponensial

Bangunan narasi revolusi industri 4.0 bertumpu pada sebuah pilar utama. Pilar tersebut adalah *Moore's Law*. *Moore's Law* adalah sebuah proyeksi yang dibuat berdasarkan observasi Gordon Moore (*co-founder* dari Intel dan penemu mikroprosesor). Gordon Moore



memproyeksikan bahwa perkembangan teknologi mikroprosesor akan mengalami percepatan eksponensial di masa depan. Yaitu tren perkembangan kemampuan mikroprosesor yang akan berlipat ganda setiap kali dan dalam rentang waktu yang semakin pendek. Karena mikroprosesor merupakan jantung dari setiap teknologi digital pada abad ke-21 maka tren eksponensial ini akan turut mempengaruhi setiap lini kehidupan yang beririsan dengan teknologi digital.

Ray Kruzweil juga menuturkan hal yang serupa melalui buku *The Singularity is Near* bahwa dunia tengah mengalami percepatan teknologi yang eksponensial. Apa yang dimaksud oleh Kruzweil dengan eksponensial adalah jarak waktu antara inovasi teknologi yang satu dengan yang lainnya akan semakin dekat. Sebagai contoh, terdapat rentang 13 tahun dan 60 lebih iOS antara iPhone generasi pertama dengan iPhone 11 Pro. Di masa percepatan teknologi yang eksponensial hanya butuh beberapa bulan saja untuk mencapai kecanggihan iPhone 11. Percepatan ini bahkan diprediksi akan mencapai sebuah titik *singularity*.

Singularity adalah kondisi di mana *artificial superintelligence* akan mengubah berbagai tatanan kehidupan di masa depan, bahkan melampaui kecerdasan manusia itu sendiri. Salah satu contoh yang diberikan oleh futuris ternama Ray Kruzweil tentang *singularity* adalah kemampuan *AI* untuk menciptakan mahakarya seni. Sebuah *software* di masa yang akan datang akan sanggup untuk melampaui kemampuan manusia dalam menulis puisi maupun menciptakan bait lagu. Dalam berbagai produksi kultur populer



hal ini telah divisualkan, sebagaimana diceritakan melalui karya *science fiction* James Cameroon, *Terminator*, yaitu peristiwa di mana sebuah komputer mencapai sebuah *consciousness* (kesadaran) lantas mengambil alih kehidupan manusia.

Apabila kita tidak dapat memisahkan antara narasi teknologi dengan realitas teknologi itu sendiri maka kita akan terjebak antara fakta dan utopia fiksi. Pada kenyataannya, *AI* tidak akan pernah mencapai titik *consciousness*, sebab *consciousness* itu sendiri masih merupakan sebuah misteri juga perdebatan yang telah dikaji oleh ilmuwan psikologi selama lebih dari 100 tahun lamanya, yaitu sejak diterbitkannya buku *Interpretation of Dreams* oleh Sigmund Freud pada 1899 hingga era *neurosains* pada awal tahun 2000. Tidak ada satu pun klaim dari ilmuwan psikologi bahwa mereka telah sepenuhnya memahami jagad *consciousness* manusia. Sedangkan apabila kita merujuk kepada Marvin Minsky, salah satu ilmuwan yang menjadi referensi utama dalam bidang *AI*, seluruh fondasi arsitektur *AI* masih mengacu kepada ilmu-ilmu humaniora, terutama psikologi.

Pandemi Sebagai Momen Pemisah

Berbagai kajian mengenai generasi, di antaranya oleh Karl Mannheim melalui *Problem of Generations* dan buku monumental *Generations: The History of America's Future 1584 to 2069* menegaskan bahwa kemunculan sebuah generasi tidak serta-merta bersifat periodik. Kemunculan sebuah generasi dengan sistem keyakinan



dan nilai-nilai yang baru akan mengemuka setelah terjadi sebuah peristiwa sosial, politik, dan kebudayaan yang berdampak pada masyarakat secara menyeluruh. Peristiwa pemisah tersebut disebut sebagai *critical moment* atau momentum pemisah. Pandemi Covid-19 adalah sebuah *critical moment* bagi generasi muda Indonesia yang akan mengubah *archetype* mereka serta generasi setelahnya.

Pengaruh dari Covid-19 bahkan lebih kuat dibandingkan dengan bendera revolusi industri 4.0 karena ia mengubah cara hubungan sosial (*physical distancing*), pandangan terhadap kesehatan, kematian, pendidikan, ekonomi, kepemimpinan politik, hingga penentuan karier di masa depan. Bahkan sampai tingkat tertentu pandemi ini mendekonstruksi segala imaji tentang revolusi industri 4.0. Sebab masa karantina menjadi proses inkubasi serta retrospeksi sebagian generasi untuk merumuskan ulang pandangan mereka terhadap dunia juga masa depan. Gerakan aksi *Black Lives Matter* yang memuncak pada bulan Juni 2020 di Amerika Serikat serta dunia merupakan salah satu buktinya.

Generasi muda tidak lagi mendengar narasi-narasi hebat tentang revolusi industri, *singularity* maupun industri berbasis kreativitas untuk kemakmuran ekonomi. Sebab narasi tersebut menjadi kurang kontekstual di tengah pandemi juga resesi ekonomi yang akan menyertainya. Satu-satunya narasi yang kontekstual di tengah masa krisis adalah gotong royong dan kemanusiaan. Secara organik di berbagai daerah muncul embrio gerakan-gerakan kepedulian oleh generasi muda, mulai dari dapur darurat, gerilya berkebun untuk

kemandirian pangan, hingga *fundraising*. Di tengah kerumunan netizen yang telah terperdaya oleh algoritma konsumerisme tentu kita masih dapati segmen yang masih saja memuat konten glamor atau kontroversial demi panjat sosial. Namun, nuansa emosi yang mendominasi sebagian besar generasi muda adalah empati, kesetaraan, dan tolong-menolong.

Kembali ke Akar

Sebelum Covid-19 melanda, salah satu kegelisahan terbesar yang dimiliki para orang tua adalah jurang generasi (*generation gap*). Margaret Mead, seorang tokoh antropologi terkemuka, pernah menulis terkait jurang generasi dalam karyanya *Culture and Commitment*. Margaret menjelaskan bahwa akan muncul satu generasi yang hanya mengambil referensi nilai-nilai dari teman sebaya. Proses itu disebut Margaret Mead sebagai proses *configurative*. Namun, pandemi telah mengubah konstalasi gap generasi tersebut. Bagi sebagian besar keluarga yang mengalami karantina di rumah, interaksi lintas generasi antara anggota keluarga terjadi secara lebih intensif. Pertukaran dan pergeseran nilai pun terjadi di tengah diskusi santai di rumah.

Generasi yang akan membangun tatanan dunia baru setelah Covid-19 kemungkinan besar akan merevisi berbagai narasi-narasi besar seperti revolusi industri 4.0 yang selama ini disodorkan kepada mereka. Narasi yang ternyata meragukan kontribusinya di tengah krisis kesehatan juga ekonomi. Mereka juga akan



mempertimbangkan kembali kearifan generasi orang tua dan leluhur mereka sebagai bagian dari tatanan dunia masa depan. Sebagai contoh, istilah pagebluk kembali dihidupkan oleh generasi muda. Pelajaran-pelajaran dari masa lampau menjadi inspirasi dalam merancang sebuah *blueprint* masa depan yang lebih *sustainable* serta manusiawi.

Gotong royong sebagai inti sari kearifan dan kebudayaan masyarakat desa akan menjadi denyut nadi generasi muda Indonesia di masa depan. Sebab sistem ekonomi dan distribusi global yang terbukti rapuh menghadapi pandemi tidak lagi menjadi tumpuan harapan seorang anak muda. Secara logis aspirasi karier masa depan bagi seorang anak muda juga akan bergeser dari kota lantas beralih ke hutan, gunung, laut, dan desa. Generasi muda akan kembali mengolah air dan tanah di mana mereka berpijak. Profesi sebagai nelayan, petani, dan penggiat lingkungan hidup akan menjadi profesi yang bercitra “heroik” bagi seorang anak muda di tengah tatanan dunia setelah Covid-19.

Gerakan kembali ke akar yang akan diambil oleh generasi muda ini sejatinya adalah sebuah *defense mechanism* atau sistem pertahanan psikologis yang akan mengembalikan makna eksistensial mereka di tengah masyarakat. Dalam kondisi mendesak sebagaimana krisis pandemi, setiap makhluk hidup pasti akan kembali ke sistem pertahanan mendasar yang mereka miliki. Sistem pertahanan ini bersifat alamiah untuk keberlangsungan hidup. Seorang anak muda layaknya sebuah benih yang baru ditanam, secara naluri



akan menguatkan terlebih dahulu akar yang mereka miliki sebelum tumbuh secara vertikal untuk keberlangsungan hidup. Bagi seorang anak muda, akar tersebut akan mengambil nutrisi berupa memori kolektif generasi terdahulu dan potensi-potensi sosial juga alam di sekitar mereka.

Kebudayaan desa akan kembali relevan di tengah tatanan baru yang akan dibangun oleh generasi muda. Sebab tata kehidupan desa yang *self-sustaining* lebih tangguh menghadapi dua terpaan krisis yang akan menyusul setelah Covid-19 berlalu, yaitu resesi ekonomi dan perubahan iklim radikal. Kita akan melihat dua arus mengemuka dari generasi muda dalam dua hingga tiga tahun ke depan, yaitu gerakan anak muda kota yang masuk ke desa untuk mengaplikasikan ilmunya dalam rangka merestorasi kembali potensi-potensi alam; dan kedua, gaya hidup masyarakat desa yang akan diadopsi di tengah komunitas warga kota agar lebih mandiri dalam menghadapi krisis. Apabila kedua hal tersebut telah berjalan maka gerakan kembali ke akar akan merestorasi imaji masa depan Indonesia sebagaimana telah dirumuskan oleh para pemuda di era revolusi. Sebuah revolusi yang tumbuh harmonis dengan akar kebudayaannya sendiri. Yaitu Indonesia yang maju dan bahagia, bebas merdeka dari materialisme, jauh dari individualisme, serta hidup secara gotong royong.[]



Profil Penulis

Kecintaannya pada ilmu psikologi dan generasi muda mendorongnya mendirikan Youth Laboratory Indonesia. Sebuah lembaga konsultan yang fokus mengamati Generasi X, Y, dan Z. Risetnya tentang budaya, kebiasaan, perilaku, dan nilai yang dimiliki kaum muda Indonesia. Beberapa hasil amatannya ia tuliskan dalam buku *Generasi Phi: Memahami Milenial Pengubah Indonesia*. Lalu, buku *Generasi Langgas* dan *Generasi Kembali ke Akar*, yang masih mengulik tentang generasi milenial di Indonesia dan bagaimana mereka mampu menjadi penggerak perubahan.

Muhammad Faisal, Ph.D. meraih gelar doktor di bidang psikologi sosial dan telah melakoni beragam profesi di psikologi. Salah satunya menjadi Kepala Program Psikologi di Institut Kesehatan Indonesia. Ia juga sempat menjadi dosen psikologi di Universitas Paramadina dan Universitas Pancasila. Selain menjadi peneliti, Muhammad Faisal aktif menjadi pembicara di berbagai seminar dan *workshop*.

Aktivitasnya berbagi gagasan psikologi tersebut ia jalani di beragam forum. Mulai dari forum di kementerian, universitas, hingga media massa. Pada tahun 2019, Tempo Institute memilihnya menjadi salah satu Ilmuwan Muda Terkemuka pada acara Tempo Media Week. Apresiasi tersebut ia dapat atas paparannya tentang proses riset di balik penulisan buku *Generasi Phi*.





Menakar Integritas Masyarakat Desa di Tengah Pandemi¹

Laode M. Syarif

Jujur, mandiri, dan sederhana merupakan nilai-nilai yang dilekatkan pada desa. Ketiga nilai tersebut ditawarkan ketika tatanan hidup dalam bernegara dan bermasyarakat mengalami kekacauan. Tatkala nilai-nilai itu dianggap menjadi produk orisinal atau anak kandung peradaban desa, mudah saja merekomendasikannya sebagai rujukan

1. Disarikan oleh Ahmad Yasin

merumuskan tatanan baru, salah satunya dengan menumbuhkan kebijakan dan budaya antikorupsi.

Tidak bisa dimungkiri pandemi Covid-19 memang telah membuat kehidupan berjalan tertatih-tatih. Momen yang biasanya membutuhkan pertemuan fisik antarmanusia, sesederhana silaturahmi dan halalbihalal digantikan oleh pertemuan secara daring—apalagi urusan menyangkut ekonomi, pemerintahan, politik, atau olahraga. Pandemi memaksa kita hidup dalam keterbatasan sehingga wacana untuk menciptakan tatanan baru dapat mencuat.

Persoalannya, sudah tepatkah kiranya perumusan akan tatanan baru itu mengacu pada kehidupan orang-orang desa? Lantas, apakah nilai-nilai desa seperti di atas memang masih bertahan? Dalam melahirkan budaya antikorupsi, “kepercayaan” akan nilai-nilai desa tersebut sebaiknya perlu diuji dan dievaluasi sesuai kenyataan.

Desa yang Beragam

Badan Pusat Statistik mencatat tahun 2018 terdapat 83.931 wilayah administratif setingkat desa di Indonesia. Dari 75.436 desa, 919 merupakan nagari di Sumatera Barat. Jumlah desa di Indonesia yang demikian banyak tentu cukup sulit dirangkum dalam beberapa nilai utama belaka. Tiap desa punya karakteristik dan kultur masing-masing.

Ketidaksadaran akan keragaman desa di Indonesia dapat menimbulkan asumsi yang tergeneralisir. Kita barangkali pernah



mendengar ungkapan seperti, “Wajah asli Indonesia dapat ditemukan di desa”. Ungkapan tersebut memang terkesan indah, tetapi juga mengandung ketidakpastian.

Kalau benar wajah asli tersebut bisa ditemukan di desa, lalu desa mana yang dimaksud? Nilai-nilai desa yang seperti apa untuk menggambarkan wajah asli Indonesia? Kemungkinan munculnya ketidakpastian sebaiknya digunakan untuk merenungkan kembali asumsi serupa yang berkembang tentang desa. Bahkan terkadang kompleksitas kehidupan setiap desa tak selalu sejalan dengan nilai-nilai desa yang telanjur dipersepsikan. Keragaman ini perlu diperhatikan dan dipikirkan sebelum menjadikan desa titik tolak untuk memupuk optimisme dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Rentang Kendali yang Sukar

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengungkapkan terdapat sejumlah 74.954 desa yang terbagi dalam 6.592 kecamatan, 514 kabupaten, dan 34 provinsi. Jumlah tersebut menuntut ketepatan dalam pengendalian dan pengelolaan yang tidak mudah.

Dampak dari kesukaran pengelolaan desa pernah terlihat pada 2019. Masih kuat di ingatan kita dugaan adanya desa fiktif yang sempat menggegerkan publik tahun lalu. Pembentukan desa fiktif diduga dalam rangka memperebutkan anggaran dana desa sebesar



satu miliar rupiah untuk masing-masing desa. Tak ayal, timbul kecurigaan terciptanya celah korupsi.

Dugaan tentang desa fiktif menunjukkan indikasi adanya kesenjangan pengawasan terhadap berlangsungnya pemerintahan di tingkat lokal. Seiring lemahnya pemantauan, potensi manipulasi akan selalu terbuka dalam rangka kepentingan mengeruk kucuran rupiah sebesar dana desa.

Tren kenaikan dana desa setiap tahun tidak hanya membutuhkan perhatian aparat desa. Sebagai kesatuan wilayah dengan batas-batas luasnya, desa punya wewenang mengatur dan mengurus kepentingan rakyat. Dengan kata lain, desa merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Perangkat desa berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi masyarakat juga punya fungsi melakukan pengawasan.

Keselarasan antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu membantu kendali atas jalannya pemerintah desa. Perlu ada kontrol untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa. Penggunaan dana tersebut disalurkan demi kemaslahatan warga desa sehingga potensi penyalahgunaan harus ditutup.

Sewaktu masih di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saya pernah menyampaikan di hadapan para kepala daerah setidaknya ada enam kebiasaan atau kesalahan pengelolaan dana desa. **Pertama**, ketidaksesuaian pengadaan barang dan jasa. **Kedua**, anggaran belanja barang digelembungkan. **Ketiga**, pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah. **Keempat**, diselewengkannya dana

desa untuk kepuasan perut sendiri. **Kelima**, pengawasan yang sangat lemah. **Keenam**, terjadi penilapan honor aparat desa.

Sekadar mengingatkan, total dana desa pada 2020 adalah Rp72 triliun. Sekitar Rp22,4 triliun atau 31 persen dari Rp72 triliun akan digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besaran untuk BLT disesuaikan total jumlah dana desa bagi masing-masing desa (*Kemendes.go.id*, “Cair April, Rp22,4 Triliun Dana Desa Digunakan untuk BLT”, 14 April 2020).

Ada gula, ada semut. Ada uang, ada apa? Peribahasa tersebut tampak cocok digunakan apabila ingin memunculkan sikap skeptis terhadap penganggaran dana yang rawan korupsi. Dengan kata lain, penting kiranya menajamkan daya kritis agar senantiasa mempertanyakan setiap dana yang dialokasikan bagi pelayanan publik, seperti dana desa.

Orang Desa adalah Manusia Biasa

Romantisasi mengenai kejujuran, kesederhanaan, dan kemandirian orang desa sebenarnya dapat dimentahkan lewat laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). Terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa yang ditemukan ICW.

Angka itu merupakan yang terbanyak pada 2019 dari 271 kasus korupsi. ICW mencatat sebesar Rp32,3 miliar disyalir merupakan kerugian negara akibat korupsi anggaran desa (*Kompas.com*, “Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019”,



18 Februari 2020). Apabila dideretkan, tentu ada sejumlah contoh kasus korupsi dana desa yang dapat dipaparkan.

Akan tetapi, temuan ICW telah memberi isyarat bahwa orang desa sesungguhnya adalah manusia biasa. Walaupun desa masih mampu menghadirkan nilai luhur dalam membangun peradaban—seperti gotong royong dan *tepa selira*—tetapi perilaku orang desa punya peluang yang sama dengan orang kota, baik dalam melakukan penyimpangan maupun mengupayakan pelayanan publik yang terpercaya.

Munculnya romantisasi orang desa kemungkinan terlahir dari dikotomi kehidupan desa dan kehidupan kota. Kedua wilayah tersebut dikontraskan dengan anggapan mengenai gaya hidupnya yang berbeda jauh atau saling bertentangan. Misalnya, gaya hidup orang kota cenderung boros dan hedonistik. Sementara gaya hidup orang desa dianggap lebih sederhana dan menerima apa adanya.

Anggapan tersebut akan menutup sebagian realitas apabila ditelan mentah-mentah. Standar ganda akan mendominasi penilaian dan perspektif kita terhadap sesuatu. Ketika standar ganda telah menguasai pikiran seseorang, bukan tak mungkin terjadi pewajaran terhadap kasus yang suatu kali menimpa pihaknya. Padahal, biasanya akan dipermasalahkan apabila pelaku merupakan pihak lain.

Perkara suap pengamanan kasus penghentian penyelewengan anggaran dana desa yang dialami Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan nonaktif, Rudi Indraprasetya, justru dapat menjadi contoh tergiurnya “orang kota” dengan dana desa. Ia menerima

suap Rp250 juta dari Kepala Desa Dasok, Agus Mulyadi, agar menyelidiki penyelewengan anggaran dana desa (ADD) disetop.

Sebelumnya, terdapat laporan penyelewengan anggaran dana desa ke inspektorat untuk pekerjaan pemasangan paving dan pembuatan pagar kantor desa. Ketidakwaiban ditemukan dalam penghitungan anggaran dana desa pada proyek tersebut. Dana yang dianggarkan sebesar Rp100 juta, padahal idealnya hanya menghabiskan Rp40 juta.

Kalau dipikir-pikir besaran jumlah yang dikorupsi sebenarnya tidak sebanding dengan ongkos suap pada kajari. Namun, niat untuk menghentikan proses laporan penyelewengan anggaran dana desa seperti halnya mengalahkan kemungkinan “kerugian” yang bakal ditanggung.

Penanganan kasus kepala desa sebenarnya bukanlah ranah KPK. Nilai korupsi juga tidak lebih dari Rp1 miliar. Namun, KPK dapat turut campur dalam penanganan perkara ini karena melibatkan kajari yang notabene merupakan aparat penegak hukum dan termasuk penyelenggara negara. Kasus ini hanyalah sebagian dari masalah pengelolaan dana desa.

Dualisme pengurusan dana desa antara Kemendesa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri juga masih menjadi salah satu pekerjaan rumah. Dualisme ini menyebabkan dana desa tidak dipegang dalam satu komando. Akibatnya, memperkusut implementasi, menyulitkan pengawasan, dan menyusahakan tata kelola. Gambaran semacam ini



setidaknya perlu dipertimbangkan sebelum menjadikan desa sebagai cermin untuk menciptakan budaya antikorupsi.

Perkara Integritas

Paparan di atas diniatkan untuk meninjau kembali nilai-nilai yang kadung mapan dilekatkan pada desa. Kejujuran, kemandirian, dan kesederhanaan rupanya bukanlah monopoli orang desa. Sebagai kejahatan yang memanfaatkan kendaraan berupa kekuasaan, korupsi sangat mungkin dilakukan oleh orang desa dan orang kota.

Kesempatan melakukan korupsi akan mudah diambil apabila seseorang cukup enteng mempertaruhkan integritasnya. KPK mengajarkan integritas disusun dari nilai-nilai seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai tersebut hanya akan menguap ketika gagal melandasi serta menyatukan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan.

Pembicaraan mengenai integritas membuat ingatan saya terlempar pada kenangan tentang kakek saya. Sewaktu saya kecil, ia memberi satu nasihat: “Kalau kamu laki-laki dan sudah besar, ada yang membedakan laki-laki dengan binatang.”

“Apa, Kek?” tanya saya.

“Binatang itu diikat lehernya, manusia diikat lisannya—diikat bicaranya.”

Nasihat itu masih menebal di dalam kepala saya sampai sekarang.



Secercah Harapan

Kendati paparan ini terkesan gelap, ada secercah harapan menuju pengelolaan dana desa yang lebih baik. Harapan tersebut dipancarkan oleh desa-desa yang sudah cukup transparan mengenai anggaran dana desa, salah satunya dengan usaha mempublikasikan anggaran dana desa agar terlihat dan terawasi oleh masyarakat.

Contoh publikasi itu pernah saya temukan di Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Raja Ampat, Papua Barat. Desa yang sesungguhnya tidak terlalu mentereng ini memasang papan yang memuat anggaran dana desa. Kita tentu amat mengharapkan semua desa di Indonesia punya publikasi seperti yang terdapat di Kampung Arborek.

Di samping publikasi secara fisik, upaya pengawasan dan penuntutan transparansi juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi JAGA. Aplikasi tersebut diluncurkan oleh KPK dengan harapan mampu diberdayakan masyarakat untuk memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan.

JAGA memuat informasi yang menyangkut profil lembaga publik, meliputi sektor pendidikan, desa, fasilitas kesehatan, pmda, hingga anggaran yang dipakai. Fitur diskusi di aplikasi ini memungkinkan siapa pun menyampaikan respons terhadap pelayanan publik, seperti keresahan atau melaporkan masalah yang terjadi.

Seperangkat sistem pengawasan akan membuka kesempatan membina integritas pejabat publik. Tidak hanya memudahkan



kontrol dari masyarakat, pemerintah juga dapat terdorong memberi tanggapan atas berbagai laporan. Pentingnya kiranya agar KPK mempertahankan dan menyempurnakan JAGA sehingga bisa terus digunakan oleh khalayak.

Akan tetapi, terciptanya tatanan baru yang antikorupsi tergantung pula dari inisiatif masyarakat untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah desa. Sebab ada kecenderungan masyarakat gampang terbuai ketika telah memperoleh saluran bantuan dari desa.

Melihat kenyataan saat ini, saya memang tak terlalu optimis bahwa peradaban antikorupsi dapat dibangun dari desa. Namun, kita bisa merumuskannya bersama-sama.[]



Profil Narasumber

Saat ini sebagai Direktur Eksekutif Kemitraan/*Partnership Governance Reform* di Indonesia. Sebelumnya, pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara ini menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2015 hingga 2019. Ia memulai karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Mengajar Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional. Ia juga mengembangkan kelas antikorupsi dan hukum lingkungan di beberapa sekolah hukum di Indonesia. Selain itu, Laode yang juga pengacara merupakan ahli kurikulum untuk pendidikan hukum lingkungan hidup di Mahkamah Agung dan anggota aktif Akademi Hukum Lingkungan IUCN.

Pernah tinggal di Australia selama tujuh tahun saat kuliah dengan beasiswa *Australia Awards Scholarship* (sebelumnya bernama *Australian Development Scholarships*). Ia mempelajari Magister Hukum di *Queensland University of Technology* (QUT) di Brisbane dan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Sidney. Selama tinggal di Australia, Laode bekerja untuk Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan di Universitas Sidney. Pengalaman riset dan mengajar juga membawanya menjadi pengajar tamu di Fakultas Hukum Universitas Sidney, Fakultas Hukum di *National University of Singapore*, dan Fakultas Hukum Universitas Cebu. Konsistensinya dalam bidang hukum membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai Alumni of the Year 2018 dari *Australia Award* di Indonesia.





Desa Berdikari sebagai Pertahanan Terakhir Menghadapi¹ Krisis

Wahyudi Anggoro Hadi

Sejak kasus pandemi Covid-19 diumumkan pada Maret lalu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai langkah preventif. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah dengan kasus Covid-19 tinggi. DKI Jakarta sebagai episentrum kasus pertama Covid-19

1. Disarikan oleh Asy Syaffa Nada

adalah yang pertama kali mulai menerapkan PSBB pada 10 April 2020.

Bertepatan dengan momentum Ramadan 1441 H, kebijakan PSBB menciptakan kekhawatiran di masyarakat terhadap kultur pulang kampung sebelum lebaran yang kemungkinan tidak dapat terlaksana. Dampak pandemi Covid-19 juga membuat perusahaan mengalami krisis ekonomi hingga terpaksa merumahkan beberapa pegawainya. Di tengah ketidakpastian ekonomi karena pekerjaan yang hilang, banyak para perantau pun memilih untuk kembali ke kampung halaman. Bahkan beberapa di antaranya mudik lebih cepat untuk menghindari penerapan PSBB yang semakin luas.

Ruralisasi sebagai salah satu dampak pandemi Covid-19 menegaskan bahwa desa sebagai ibu bumi merupakan tempat kembali sekaligus menjadi pertahanan terakhir. Pandemi ini bukan hanya merupakan krisis kota karena pada kenyataannya kehidupan desa pun mengalami dampaknya. Sehingga kehadiran Covid-19 secara tidak langsung telah mendekonstruksi tatanan kehidupan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa desa menjadi kanal pertahanan terakhir bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi krisis.

Tatanan kehidupan masyarakat kota hingga desa pun lambat laun mulai memasuki kenormalan baru. Tidak hanya secara teknis, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, ataupun menjaga jarak fisik, kenormalan baru dalam menghadapi Covid-19 perlu



dimaknai secara lebih substantif tentang merancang ulang kehidupan berdesa, berbangsa, dan bernegara.

Relasi Nilai Penopang Ketangguhan Desa

Di tengah masa pandemi yang masih panjang, desa menunjukkan ketangguhannya dalam melewati krisis kesehatan ini. Ketangguhan desa tidak hanya berasal dari sumber daya air bersih, udara bersih, dan pangan sehatnya. Namun, desa juga memiliki pranata sosial berupa kebudayaan yang mengokohkan fondasi kebersamaan.

Keluargaan menjadi basis nilai bagi desa dalam mengukuhkan relasi secara sosial. Sehingga ketika banyak institusi sosial formal di kota perannya dinihilkan akibat Covid-19, warga masyarakat kota memilih kembali ke desa dan menjadikannya tempat berlindung paling aman untuk menyelamatkan diri dari ketidakstabilan ekonomi kota. Selain itu, kerja sama sebagai basis nilai dalam relasi ekonomi yang diterapkan desa menjadikannya tempat berpulang sekaligus sandaran hidup terakhir ketika aktivitas ekonomi kota tumbang.

Desa tidak hanya tangguh dalam menerapkan nilai kebersamaan dan empati. Bahkan dalam relasi secara politik, musyawarah menjadi basis nilai yang membuat desa menjadi tempat ditemukannya kembali martabat sebagai manusia yang berdaulat. Itulah mengapa desa memiliki peran strategis sebagai angin segar untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi.

Setiap basis nilai yang terdapat dalam lingkup kehidupan desa, yaitu keluargaan pada relasi sosial, kerja sama pada relasi ekonomi,



dan musyawarah dalam relasi politik merupakan bagian dari makna kooperatif gotong royong. Makna tersebut termasuk sebagai pranata sosial yang lahir dari alam pikiran nusantara—alam pikiran desa. Sehingga penghormatan negara atas desa akan menjadi prasyarat kunci memenangkan tantangan masa depan.

Desa Tanggap Krisis

Panggungharjo sebagai satu dari ribuan desa yang ada di Indonesia mengembangkan berbagai langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah mempersiapkan gugus tugas Panggung Tanggap Covid-19 melalui saluran siaga yang tersedia. Gugus tugas dikelola untuk menjadi jembatan dalam mempertemukan kehadiran negara dan keberdayaan sosial yang ada di Desa Panggungharjo.

Dalam kehidupan warga masyarakat desa, pandemi Covid-19 menimbulkan tiga dampak utama, yaitu dampak sosial, dampak klinis, dan dampak ekonomi. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, dua pekan setelah pemerintah pusat mengumumkan kasus pertama, pemerintah Desa Panggungharjo mulai berinisiatif melakukan pemetaan potensi penyebaran virus melalui *website* yang diisi secara mandiri oleh warga masyarakat.

Melalui aplikasi berbasis web, mitigasi dampak klinis sebagai bagian dari pemetaan potensi penyebaran virus dinilai berdasarkan empat hal, yaitu gejala klinis, riwayat perjalanan, riwayat kontak,



dan penyakit penyerta. Interpretasi berdasarkan kategori risiko pun dihadirkan beserta solusinya. Edukasi untuk menghindari penyebaran Covid-19 diberlakukan untuk warga masyarakat yang berada dalam kategori penularan dengan risiko rendah. Sementara bagi yang memiliki risiko penularan sedang, pemerintah berupaya untuk melakukan pemantauan klinis. Sedangkan bantuan klinis diberlakukan ketika warga masyarakat memiliki risiko penularan yang tinggi.

Menekan potensi penyebaran virus tidak akan maksimal jika aktivitas sosial masyarakat tidak diatur secara bijak. Pandemi ini telah berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang tidak lagi dapat berjalan secara normal. Sehingga pada aktivitas sosial masyarakat seperti penyelenggaraan aktivitas keagamaan, tata cara penerimaan tamu, hajatan, dan berbagai aktivitas sosial lainnya perlu mengalami perubahan.

Mitigasi dampak sosial dapat terwujud ketika mulai timbul peningkatan kesadaran kolektif atas krisis serta pembangunan pranata sosial baru. Kesadaran kolektif pada masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini dapat terlihat dari bagaimana secara mandiri tiap-tiap desa memberlakukan *lockdown* wilayah. Mereka saling menjaga lingkungan sekitar, membatasi tamu yang masuk desa, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara kolektif.

Kesadaran kolektif warga masyarakat desa tidak serta-merta hadir begitu saja. Respons masyarakat terkait pandemi Covid-19 pun beragam. Secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua

kelompok, yaitu masyarakat yang sangat abai dengan menganggap situasi pandemi sebagai hal biasa dan masyarakat yang menyikapi hal ini dengan kepanikan. Memantik kesadaran kolektif warga masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan dekontaminasi secara demonstratif, melakukan penyemprotan, dan lain sebagainya.

Kurang lebih sebanyak 5.000 liter disinfektan telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Panggungharjo. Perilaku tersebut menjadi contoh langkah penanggulangan penyebaran virus sebagai bagian dari cara kami menyampaikan pesan kepada warga masyarakat desa bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi sangat serius. Sehingga perubahan cara pandang perlu ditingkatkan karena saat ini kita menghadapi kenormalan baru.

Sedangkan pada warga masyarakat desa yang mengalami kepanikan, langkah-langkah preventif pemerintah desa menjadi sesuatu hal yang menenangkan. Bahwa pemerintah responsif untuk melakukan penanganan dalam mengurangi dampak pandemi yang dirasakan oleh warga masyarakat desa. Contoh-contoh konkret yang dilakukan pemerintah dapat membangkitkan kesadaran kolektif. Meskipun seringkali pemerintah desa memerlukan cara-cara yang sedikit dramatik untuk menyampaikan pesan bahwa situasi pandemi saat ini merupakan hal serius.

Selain itu, mitigasi dampak sosial dapat dilakukan melalui pembangunan pranata-pranata sosial baru. Pada Desa Panggungharjo, pranata-pranata sosial baru salah satunya hadir dari bagaimana



warga masyarakat desa menyambut empat warga positif Covid-19 yang telah berhasil sembuh. Pranata sosial untuk mengatur pola relasi antarwarga masyarakat desa berhasil ditumbuhkan oleh Desa Panggungharjo yang tercermin dalam sikap saling mendukung pada penyambutan tersebut. Hal itu menjadi tanda penting bahwa mitigasi dampak sosial berjalan secara baik sekaligus mampu meminimalisir potensi konflik antarmasyarakat.

Menyambut Digitalisasi, Meningkatkan Ketahanan Pangan Desa

Seperti halnya penanggulangan dampak klinis dengan memanfaatkan teknologi digital, mitigasi dampak ekonomi pun menggunakan *platform* digital untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal positif yang dapat dipetik hikmahnya dari adanya Covid-19 ini adalah lahirnya melek literasi digital. Baik itu dalam lingkup pemerintahan maupun warga masyarakat desa.

Mitigasi dampak ekonomi yang pertama dilakukan oleh Desa Panggungharjo adalah memfasilitasi warga masyarakat yang kekurangan dengan memberikan bantuan. Melalui aplikasi berbasis web, warga masyarakat desa mengisi formulir yang tersedia secara *online*. Hasilnya, ketahanan ekonomi warga masyarakat desa dikategorisasikan berdasarkan kriteria kerentanan yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu pola konsumsi, kepemilikan aset, kepemilikan dana cadangan, jenis pekerjaan, besaran dan jenis pendapatan, keberadaan kelompok rentan, dan kepemilikan jaminan sosial.

Setelah dipastikan data tepat sasaran, berbagai paket sembako pun dibagikan untuk mencegah kerawanan pangan.

Sedangkan untuk menjaga roda ekonomi desa agar dapat terus berputar, pemerintah Desa Panggungharjo mengembangkan *platform* digital bernama *pasardesa.id*. *Platform* ini merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi rantai pasok pangan. Selain itu, juga menjadi jembatan penghubung dalam mempertemukan barang-barang yang tersedia dengan masyarakat yang membutuhkan.

Aktivitas sosial yang mulai dibatasi agar dapat menekan penyebaran virus membuat *pasardesa.id* menjadi salah satu cara efektif bagi warga masyarakat desa untuk berbelanja. *Platform* ini pun menjadi jalan terang bagi para pedagang ketika pasar mulai kehilangan pengunjunganya. Melek digital kemudian menjadi kunci utama untuk mengatasi krisis, menjadi media dalam memasarkan produk-produk desa hingga menjaga stabilitas perputaran roda perekonomian.

Desa Panggungharjo terus berupaya mengurangi dampak krisis berdasarkan laporan dari warga masyarakat desa melalui *hotline* Panggungharjo Tanggap Covid-19. Tidak hanya mulai gencar memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi pemasaran produk desa, kami pun berupaya mengembangkan pengalaman panjang warga masyarakat desa dalam ketahanan pangan. Salah satunya, penerapan kedaulatan pangan yang dimulai dari lingkungan rumah atau disebut dengan karangkitri. Fungsi pekarangan rumah-rumah di



Jawa Tengah pada dasarnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Di antaranya pasti kita akan menemui empon-empon (tanaman obat), kelapa (protein nabati), tanaman buah (vitamin), dan hewan piaraan (protein hewani) di sekitar rumah.

Sadar Kemandirian, Kunci Berdikari

Sejak revolusi hijau kita mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Sehingga penting bahwasanya kita mesti kembali menggali pengetahuan-pengetahuan asli desa sebagai upaya untuk membangun tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru dalam konteks berdesa dan berbangsa maupun bernegara dapat dimulai dari kemandirian desa yang ditopang oleh tiga aspek utama:

Pertama, kapasitas politik dan kepemimpinan sumber daya yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa. **Kedua**, kapasitas proses dan birokrasi menjadi sumber daya yang patut dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. **Ketiga**, kapasitas sosial menjadi sumber daya penting yang semestinya dimiliki oleh warga masyarakat desa. Ketiga aspek utama tersebut mampu menjadi indikator untuk menanggulangi struktur birokrasi pemerintah desa yang buruk ataupun mengatasi kemandirian desa yang belum terbangun.

Kemandirian desa adalah kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset. Kemandirian tersebut dapat berjalan dengan baik jika ditopang oleh tiga aspek utama pada pemaparan sebelumnya. Namun, kunci kemandirian desa pada dasarnya terdapat

di aspek kapasitas sosial. Pemerintah desa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Sehingga kapasitas sosial perlu didorong menjadi modal sosial yang disepakati menjadi modal bersama agar dapat digunakan untuk mencukupkan kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan di desa.

Kapasitas sosial yang menjadi modal sosial salah satunya terkait dengan partisipasi aktif warga masyarakat desa dalam menjaga proses politik desa agar berlangsung secara sehat. Siapa pun pemimpin yang lahir dari proses politik yang ada di desa mampu membangun kapasitas politiknya yang ditopang oleh 5 kapasitas dasar, yaitu kapasitas regulasi, distribusi, ekstraktif, responsif, dan jaringan.

Kenyataan membuktikan bahwa desa menjadi kanal pertahanan terakhir kita dalam menghadapi krisis. Sehingga kemandirian desa perlu untuk terus dikolaborasikan dan dikembangkan. Apa yang dilakukan oleh Desa Pangunharjo merupakan bagian kecil dari bukti bahwa desa memiliki ketangguhan dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19. Kesadaran kolektif antarpemerintah dan masyarakat desa pun terus ditingkatkan. Sehingga apa pun kondisi yang ada di desa jangan pernah tinggalkan desa karena desa layak diperjuangkan.[]



Profil Narasumber

Hanya butuh dua pekan setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia untuk membuatnya segera membentuk gugus tugas PANGGUNG TANGGAP Covid-19 (PTC). Kebijakan ini terbukti efektif untuk mitigasi pandemi di wilayahnya, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta.

Menurutnya, ada tiga dampak pandemi yang harus dihadapi warganya, yakni dampak klinis, sosial, dan ekonomi. Dampak klinis dikelola bersama pihak terkait, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan. Sedang dampak sosial dikelola bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama agar tidak ada stigma pada pasien positif Covid-19. Lalu, untuk dampak ekonomi, selain membagi paket sembako untuk mencegah kerawanan pangan, Wahyudi mengembangkan platform *pasardesa.id*. Tujuannya, untuk menjaga roda ekonomi desa agar tetap berputar.

Menjabat kepala desa sejak 2013, Wahyudi mengawalinya dengan reformasi birokrasi. Karena ia yakin, hanya dengan birokrasi yang sehat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa akan meningkat. Sehingga beragam program akan lebih mudah dijalankan karena akan selalu mendapat dukungan. Komitmennya tersebut kemudian mengantarkan Desa Panggungharjo sebagai juara lomba desa tingkat nasional yang dianugerahkan bertepatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 pada tahun 2014. Sejak itu Desa Panggungharjo menjadi rujukan untuk pengembangan desa-desa di Indonesia.



Physical Distancing Bukan Berarti Social Distancing

Aditya Mahendra Putra

Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang, dan mandiri. Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan BPS pada 2018 menggambarkan jumlah desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen).

Hasil ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, kita juga perlu mencermati tiga masalah mendasar perdesaan, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Berdasarkan laporan yang dirilis SMERU pada 2018, terdapat penurunan jumlah penduduk usia produktif di desa, yaitu dari 56 persen (2006) turun menjadi 49 persen (2016). Secara akumulatif rasio beban ketergantungan juga tercatat mengalami penurunan dari 69,5 persen (2006) menjadi 67,5 persen (2016).

Rasio ketergantungan (*defendency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut sebagai bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Laju urbanisasi di Indonesia juga tercatat terus mengalami peningkatan. Litbang Ketransmigrasian Republik Indonesia mencatat, secara nasional pada tahun 1980 urbanisasi melonjak dari 22,3 persen menjadi 30,9 persen pada tahun 1990. Jumlah tersebut meningkat hingga 34,3 persen pada tahun 1994 dan meningkat lagi menjadi 42 persen di tahun 2000. Badan Pusat Statistik memproyeksikan urbanisasi di negara kita bakal berada di kisaran 160 persen pada tahun 2025 mendatang. Sejauh ini jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 45



persen dari jumlah penduduk keseluruhan dan diperkirakan bakal meningkat hingga mendekati 70 persen di tahun 2025

Industrialisasi dan modernisasi agaknya cenderung menempatkan pola pembangunan di negeri ini menjadi semakin kota sentris. Hampir semua aktivitas industri dan modal bermuara di suatu kawasan tertentu. Pemerataan kesempatan kerja masih menjadi hal yang jauh pada saat ini.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Mesin produksi macet, daya beli turun, dan transaksi pun lesu. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi semakin menyeramkan. Hingga 2 Juni 2020, sebanyak 3,05 juta pekerja terkena PHK. Bahkan sebanyak 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor pekerja bebas

Angka kemiskinan yang bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Kota tidak lagi bisa memberi janji nasib yang lebih baik. Kota tidak lagi ramah bagi para petarung kehidupan, semua kembali ke desa.

Eksodus besar-besaran ke desa pun tidak terelakkan, bonus demografi di desa naik. Hal ini bisa menjadi berkah sekaligus tantangan bagi desa. Desa bisa menjadi arena kompetisi baru di satu sisi atau desa bisa menjadi ruang demokratisasi ekonomi menuju



kemandirian desa dalam kerangka besar visi membangun Indonesia dari pinggiran.

Momentum Desa

Paradigma pembangunan desa bergeser pascalahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014, dari yang sebelumnya menjadikan desa sebagai objek pembangunan menjadikan desa dalam posisi strategis sebagai subjek utama penggerak pembangunan. Desa diposisikan sebagai daerah otonom yang berada dalam wilayah kabupaten. Mandat pembangunan di desa digenjot dengan suntikan dana desa.

Hal ini menjadi angin segar bagi desa. Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pemberian pengakuan atas keberadaan (eksistensi) desa bahwa desa sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan lokal berskala desa. Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*self governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self government*).

Desa dalam posisi strategis dalam mendayagunakan segala kewenangan dan aset dalam upaya membangun kemandiriannya. Kemandirian desa ditopang oleh 3 arus utama: 1.) Kapasitas politik dan kepemimpinan; 2.) Kapasitas birokrasi dan proses; 3.) Kapasitas sosial, yaitu segala sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, sangat penting menjadikan kapasitas sosial sebagai

fondasi utama dalam pembangunan desa. Sehingga sangat penting untuk mendorong kapasitas sosial menjadi modal sosial.

Modal sosial juga sangat penting sebagai prasyarat menopang proses politik dan birokrasi yang baik. Kapasitas modal sosial perlu dimoderasi dengan pengaturan-pengaturan dalam rangka membentuk ekosistem desa mandiri.

Habitus politik desa yang lamban dan korup perlu dikikis habis. Dimensi relasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang terbangun selama ini, yang hanya hubungan administratif semata dan menjadikan masyarakat sebagai kantong suara serta kehadiran fisik pada saat musyawarah-musyawarah tingkat desa yang ujungnya hanya untuk legitimasi kekuasaan perlu diperluas lagi. Budaya musyawarah dan gotong royong yang sudah mengakar di desa perlu diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan berdesa.

Desa dan Kewenangannya

Mengacu pada pandangan SF. Marbun (1997), perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara, seperti halnya desa dalam menjalankan fungsinya:

Dengan kata lain, wewenang desa adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Artinya, kewenangan yang dimiliki desa merupakan proses *delegation of authority* dan proses



decentralization of power perlu dilaksanakan melalui langkah-langkah konstitusional.

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan UU No. 6/2014 yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya secara substantif negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa sekaligus pengakuan (bukan pemberian) kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa.

Permendes No.1 Tahun 2015 menyebutkan setidaknya terdapat 4 bidang yang termasuk dalam kewenangan lokal berskala desa, yakni: 1.) Bidang pemerintahan desa; 2.) Bidang pembangunan desa; 3.) Bidang kemasyarakatan desa; dan 4.) Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dari 4 bidang kewenangan lokal berskala desa setidaknya dapat diturunkan ke dalam puluhan bahkan ratusan (tergantung konteks lokal dan kebutuhan) program kegiatan untuk mengurus hajat hidup masyarakat desa. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.



Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendayagunakan aset dan kewenangan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa dan masyarakat harus secara bersama memetakan dan menginventarisasi aset dan potensi (baik bentang alam maupun bentang sosial budaya) untuk selanjutnya melembagakan partisipasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Sebagai contoh dalam hal pengembangan ekonomi lokal desa. Desa sejatinya menyimpan banyak potensi yang bisa dikembangkan. Namun, di sinilah problemnya, banyak desa “rabun jauh”. Mereka cenderung lebih mudah mengenali potensi yang dimiliki desa lain alih-alih melihat ke dalam desa mereka sendiri. Karena pada hakikatnya desa bukan miskin potensi, tetapi miskin kreativitas dan konektivitas. Dibutuhkan inovasi dan kerja sama antarlini untuk menciptakan perputaran ekonomi di desa. Potensi-potensi desa perlu digali lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan kompetitif di desa mutlak diciptakan melalui proses inovasi berkelanjutan.

Masyarakat sebagai arus utama pembangunan di desa perlu difasilitasi oleh pemerintah desa melalui pengaturan-pengaturan regulasi untuk menjamin keberlangsungannya. Pemerintah desa dengan kewenangan anggarannya juga perlu meninjau ulang gagasan pembangunannya. Alokasi lebih untuk sektor-sektor yang lebih produktif perlu diperhatikan. Sebagai contoh pengembangan BUMDes. BUMDes yang produktif terbukti mampu menjadi salah satu tiang penyangga kemandirian ekonomi desa. Genetika BUMDes



terbilang unik: memberikan benefit pada masyarakat di satu sisi serta menghasilkan profit di sisi lain. BUMDes bisa membuka lapangan pekerjaan sekaligus menjadi motor penggerak perputaran ekonomi di desa serta dapat memberi kontribusi bagi pendapatan asli desa. BUMDes merupakan perwujudan nyata demokrasi ekonomi di tingkat desa.

Pelebagaan partisipasi juga sangat penting guna menjaga keseimbangan relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Sudah selayaknya pemerintah desa melakukan fungsi moderasi dan fasilitasi guna membuka ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga *monitoring*, dan evaluasi pembangunan di desa karena pada dasarnya esensi pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Aset Utama Desa Adalah Manusianya

Globalisasi dan modernisasi menuntut spesifikasi, bukan generalisasi. Konstruksi pendidikan saat ini menjebak kita pada linearitas keahlian untuk menguasai satu bidang tertentu agar dapat melaju dalam persaingan. Argumentasi tersebut terbantahkan pada masa pandemi ini. Kemampuan adaptasi dan kerja sama terbukti lebih ampuh dalam menghadapi dinamika perubahan-perubahan yang terjadi. *Mindset “expertise bidang”* perlu dirombak di generasi kita untuk mengikis kegagapan di tengah krisis. Mereka yang cerdas sejatinya adalah mereka yang mampu bertahan dan menyesuaikan



diri di tengah krisis. Seorang ahli mekatronika tidak perlu merasa canggung dan gengsi ketika memegang cangkul di sawah. Setiap orang perlu saling terhubung bekerja sama bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakatnya.

Budaya gotong royong dan interaksi-interaksi sosial sudah tersemayam subur di pedesaan. Hal ini menjadi sebuah keuntungan karena dari interaksi-interaksi yang terjalin dapat membentuk ikatan saling percaya (*trust*) di antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah desa. Pada tingkatan selanjutnya modal sosial sebagai karakter demokrasi dan pemberdayaan di mana semua pihak terlibat dalam upaya mewujudkan tujuan kemanfaatan bersama atas dasar saling menghormati, saling percaya, persamaan status, sedangkan wujud perbedaan mereka ada di dalam posisi masing-masing.

Pada dasarnya rekonstruksi pranata sosial di desa bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah desa (dimensi struktural), tetapi juga menjadi tanggung jawab yang harus diemban bersama dengan masyarakat. Dimensi kultural juga memegang peranan penting. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengaruh sebaya mutlak diperlukan untuk memobilisasi sebuah inisiatif menjadi gerakan bersama.

Penghormatan atas partisipasi masyarakat melalui pelembagaan kemasyarakatan bukan hanya penting untuk menciptakan *value*, tetapi juga merupakan langkah strategis bagi desa dalam upaya menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki



kualitas *leadership*, berjiati diri, dan berbudaya. Partisipasi yang terorganisir merupakan mekanisme manajemen talenta organik yang efektif dan efisien.

Kesimpulan

Tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. Merdesa berasal dari kata ‘desa’ dalam bahasa Jawa kuno, artinya tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat.

Desa terbukti mampu menahan guncangan akibat krisis yang terjadi, kita bisa menengok sejarah mulai dari reformasi 1998, resesi ekonomi global 2008, hingga krisis akibat pandemi 2020. Setidaknya hipotesis yang menyatakan bahwa semakin subsisten suatu kelompok masyarakat maka semakin kecil pula dampak yang dirasakan terhadap dinamika global terbukti. Ketika industri dan sistem pasar di kota lesu akibat pandemi, dampak yang dirasakan desa cenderung tidak signifikan karena mereka punya sistem nilai-nilai yang menjadi benteng pertahanan.

Alokasi anggaran dari pusat dan daerah hendaknya dimaknai sebagai dana stimulan. Desa semestinya mulai merencanakan untuk melepaskan diri dari jerat ketergantungan anggaran. Kemandirian desa haruslah diwujudkan dalam gerakan bersama seluruh elemen yang ada di desa, bukan hanya sebatas wacana imajinatif.



Kerja sama seluruh elemen masyarakat di desa mutlak diperlukan untuk akselerasi pembangunan di desa. Pranata dan penguatan kapasitas sosial harus berjalan seiringan dengan penggunaan kewenangan desa dalam mengatur dirinya. Pembangunan desa hendaknya tidak mengesampingkan aspek kearifan lokal, perspektif lingkungan, dan inklusivitas, artinya pembangunan desa harus diperjuangkan dan dinikmati bersama tanpa mendekonstruksi corak alam dan budaya yang ada di desa.

Covid-19 sedikit banyak menghambat ruang gerak kita, membuat kita berjarak fisik satu dengan lainnya. Namun, perjuangan tidak boleh berhenti, misi memperjuangkan desa sebagai rumah yang layak harus berlandaskan semangat persatuan. Jaga jarak fisik bukan berarti berjarak sosial. []



Profil Penulis

Aditya Mahendra Putra, lahir di Klaten, 29 Oktober 1989. Ia memiliki minat yang besar terhadap segala kajian yang berhubungan dengan desa. Sejak beberapa tahun terakhir telah bekerja dalam isu desa dan pemberdayaan. Pernah bekerja sebagai konsultan di PT ERM Indonesia dalam program mitigasi dampak sosial akibat proyek tol Cikampek-Palimanan pada medio 2013-2015. Dalam kurun waktu 2018-2019 berperan sebagai manajer program di *bumdes.id*. Saat ini terlibat aktif dalam inisiasi dan inkubasi Sanggar Inovasi Desa.





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Oleh:

Ryan Sugiarto

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,
Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer,

mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggunharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggunharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggunharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggunharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggunharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Lapor dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya.

Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai



kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan

rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi



kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19¹.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyheramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK².

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/

1. Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

2. Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun³.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan

3. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya.



Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan.



Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.



Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat pada kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat pada kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiyah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”



Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang



berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.



Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah



sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat.



Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁴

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan

4. Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20

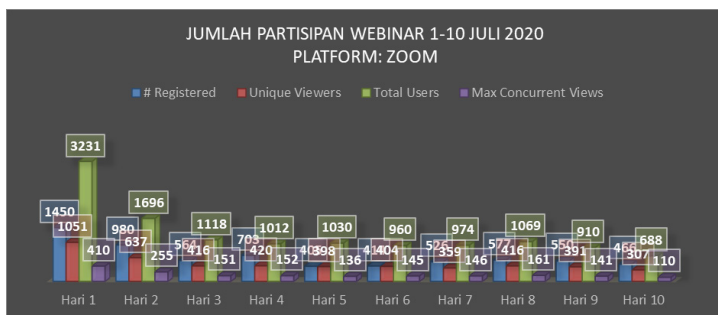


tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru;



Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

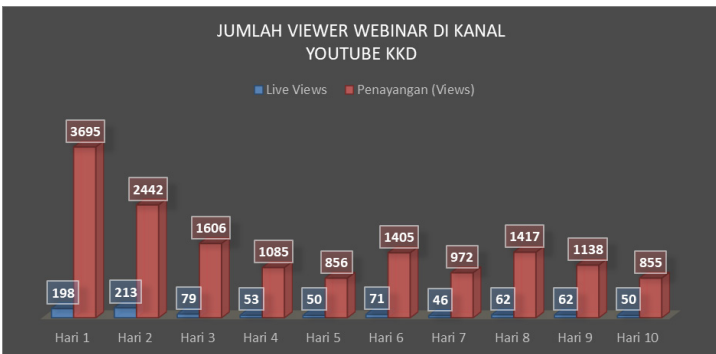


Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

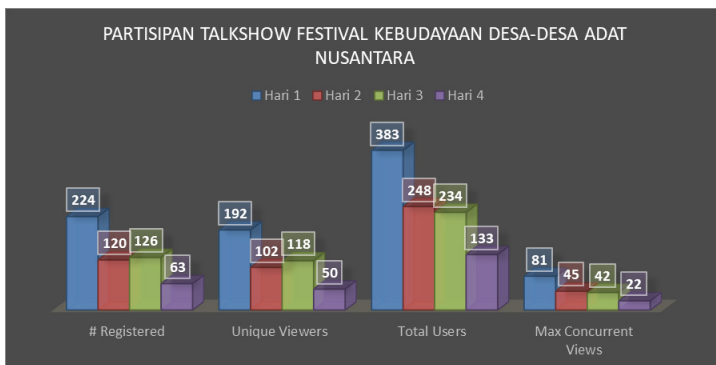


Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang

arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

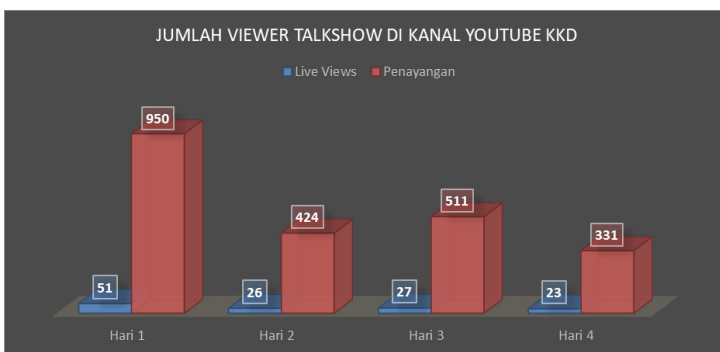


Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom

Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung



melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.



Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

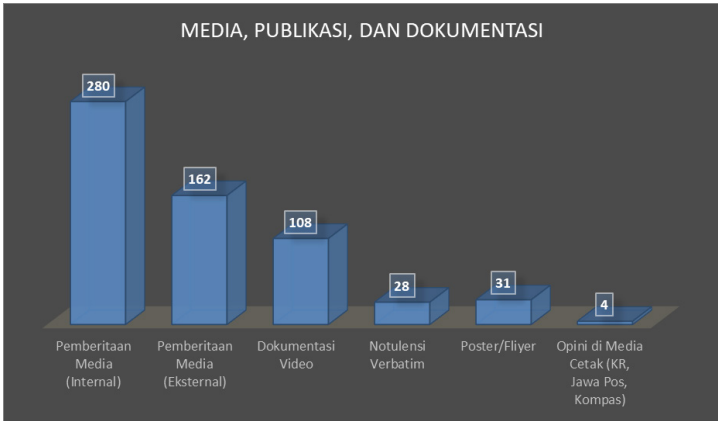
Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesia.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah



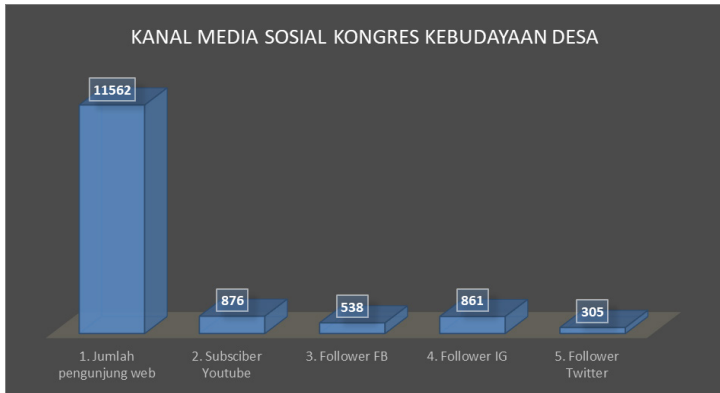


Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD

jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesa.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkas agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan



Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD

menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi



dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian

desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesdesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat



secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan![]

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa

sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.[]

Yogyakarta 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana
5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

Tim Buku dan Call Of Papers

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi



JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020



